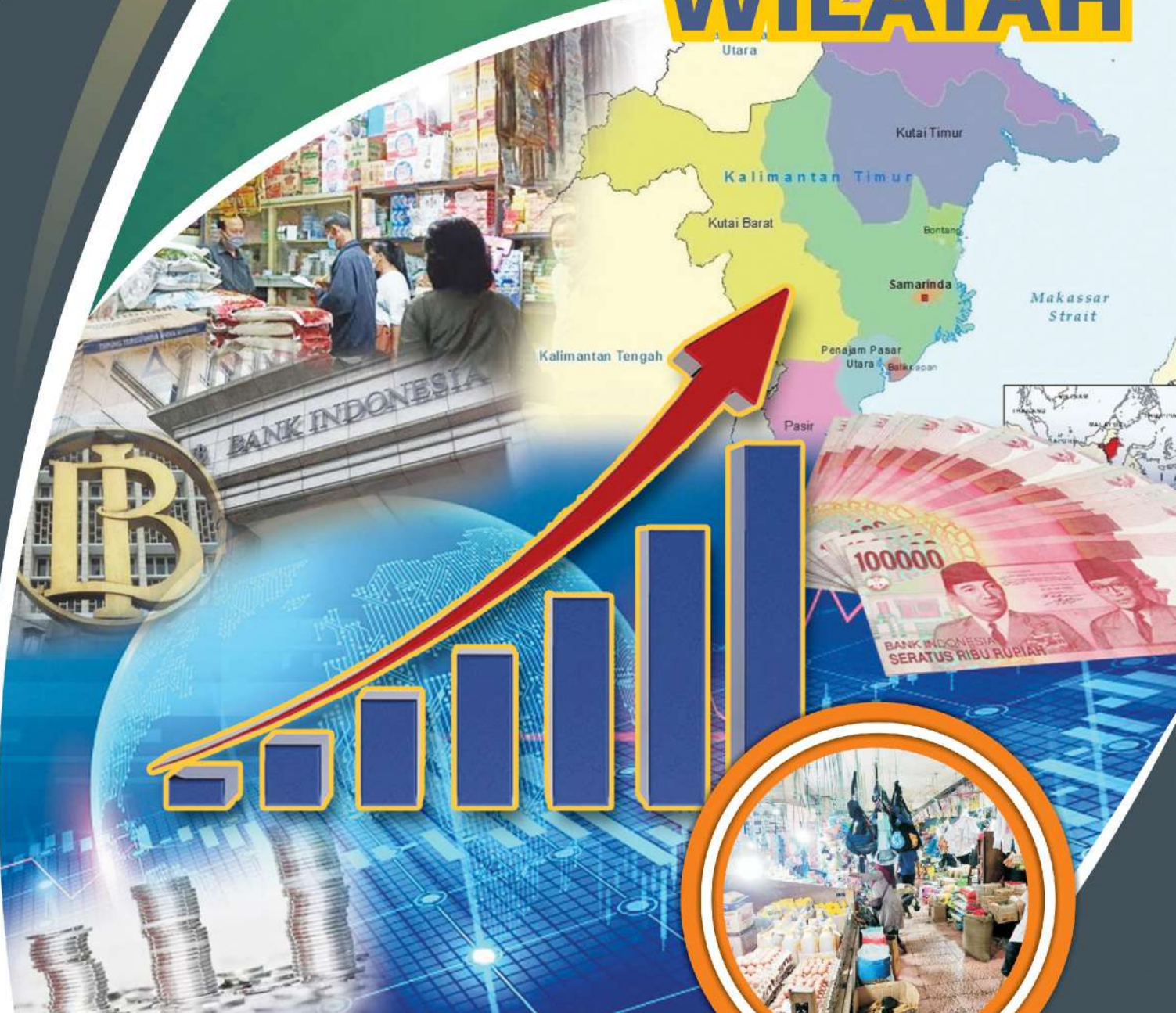




PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ANALISIS KETIMPANGAN WILAYAH



Tahun **2022**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Buku Analisis Ketimpangan Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Semester II Tahun 2020 pada Kegiatan Pengembangan Data dan Analisis Sektor Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2020 dapat diselesaikan.

Perbedaan tingkat kuantitas dan kualitas sumber daya alam yang dimiliki suatu wilayah serta perbedaan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang dimiliki wilayah menjadi salah satu penyebab timbulnya ketimpangan atau kesenjangan antar daerah. Tingkat perbedaan pendapatan masyarakat selain berasal dari faktor internal seperti SDM (Sumber Daya Manusia) juga disebabkan dari faktor eksternal yakni ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Tujuan dari pembuatan buku ini adalah untuk mengetahui pola dan struktur ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Dari buku ini mengetahui pengaruh tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu juga untuk mengetahui pengaruh variable PDRB, PAD, DAU dan IPM terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur.

Semoga buku ini dapat menjadi bahan evaluasi dan tolok ukur dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan menjadi bahan perbaikan untuk masa yang akan datang.

TIM PENYUSUN



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan.....	2
BAB II GAMBARAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.....	3
2.1 Kondisi Geografis dan Administrasi	5
2.2 Kependudukan.....	6
2.3 Kondisi Perekonomian	6
2.3.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	11
2.3.2 Kemiskinan.....	12
2.3.3 Ketenagakerjaan	12
2.4 Pembangunan Manusia	14
BAB III ANALISIS KETIMPANGAN KALIMANTAN TIMUR.....	17
3.1 Ketimpangan Pendapatan.....	17
3.2 Kondisi Ketimpangan Antar Wilayah (Indeks Williamson).....	25
3.3 Tipologi Klassen.....	30



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Kalimantan Timur	3
Gambar 2.2	Laju Pertumbuhan PDRB Kalimantan Timur, 2011-2020	7
Gambar 2.3	IPM dan Pertumbuhan IPM Kalimantan Timur, 2010-2021	15
Gambar 3.1	Indeks Gini Indonesia Menurut Tipe Wilayah, Tahun 2016-2021	20
Gambar 3.2	Indeks Gini Kalimantan Timur, Tahun 2016-2021	21
Gambar 3.3	Perkembangan Persentase Pengeluaran Kelompok 40 Persen Terendah, Kalimantan Timur, Maret 2017-September 29	23
Gambar 3.4	Perkembangan Penduduk Miskin menurut Kriteria, Maret 2020-September 2021	24
Gambar 3.6	Ketimpangan Antar Wilayah di Indonesia (Indeks Williamson).....	26
Gambar 3.7	Ketimpangan Antar Wilayah Regional Kalimantan (Indeks Williamson).....	28
Gambar 3.8	Ketimpangan Antar Wilayah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur (Indeks Williamson)	29
Gambar 3.9	Tipologi Klassen Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Persentase Penduduk Miskin, Tahun 2019	30



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kondisi Iklim Kalimantan Timur, 2019-2021	4
Tabel 2.2	Daerah Administrasi Kalimantan Timur, 2021	4
Tabel 2.3	Statistik Kependudukan Provinsi Kalimantan Timur, 2021	5
Tabel 2.4	Perkembangan PDRB Kalimantan Timur, 2017 – 2021	6
Tabel 2.5	Kondisi Perekonomian Kalimantan Timur menurut Lapangan Usaha, 2020-2021	8
Tabel 2.6	Perekonomian Kalimantan Timur dari Sisi Pengeluaran, 2020-2021	10
Tabel 2.7	PDRB Kalimantan Timur menurut Kabupaten/Kota, 2021	11
Tabel 2.8	Statistik Kemiskinan Kalimantan Timur menurut Kabupaten/Kota, 2021	12
Tabel 2.9	Statistik Ketenagakerjaan Kalimantan Timur, 2019-2021	13
Tabel 2.10	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kalimantan Timur menurut Kabupaten/Kota, 2019-2021	13
Tabel 2.11	Upah Minimum Kerja (UMK) menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, 2021	14
Tabel 2.12	Statistik Pembangunan Manusia Kalimantan Timur, 2021	16
Tabel 3.1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita (Ribu Rupiah)	27
Tabel 3.2	Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (Ribu Rupiah) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur	29



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi dalam suatu wilayah diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati oleh masyarakat dalam wilayah tersebut tanpa terkecuali. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi seharusnya berjalan selaras, sehingga terdapat peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat pada seluruh lapisan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan pemerataan ekonomi, hanya akan memperlebar jurang pemisah antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya (masyarakat yang kaya dan yang miskin) atau antara wilayah yang satu dengan yang lain (wilayah maju dan wilayah tertinggal).

Ketimpangan yang tinggi dalam suatu wilayah/negara berpotensi dalam menciptakan berbagai permasalahan sosial-ekonomi, misalnya kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi wilayah dan disparitas ekonomi yang makin lebar dan tajam. Selain itu, dampak lain yang dapat terjadi adalah adanya peningkatan migrasi dari daerah yang miskin ke daerah yang maju. Jika penduduk migran tersebut tidak dapat segera terserap dalam lapangan pekerjaan agar mereka dapat bekerja produktif, maka dapat berakibat kepada tingkat kesejahteraannya yang menjadi rendah. Pada akhirnya, kondisi tersebut dapat menciptakan kecemburuan serta ketidakpuasan masyarakat, yang dapat berpotensi pada peningkatan tindakan kriminal, konflik antar masyarakat, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Ketimpangan antar wilayah juga turut mewarnai dinamika pembangunan manusia di Indonesia. Rentang luas wilayah Indonesia yang cukup besar serta tidak meratanya pembangunan menyebabkan ketimpangan terjadi, baik antara perkotaan dengan perdesaan, antarprovinsi, antarkabupaten, serta antara kota dengan kabupaten. Dalam tujuan pembangunan wilayah hingga tahun 2024, Pemerintah Pusat terus berupaya mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sumatera. Salah satu sasaran yang harus dicapai dalam lima tahun mendatang adalah mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan mendorong percepatan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.

Isu strategis yang juga menjadi fokus RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024 adalah ketimpangan antar provinsi dalam wilayah pulau. Pulau Kalimantan tercatat memiliki ketimpangan yang cukup tinggi. Ukuran ketimpangan merupakan salah satu indikator capaian kebijakan distribusi pembangunan serta hasil-hasilnya. Dengan demikian, tingkat ketimpangan yang tinggi memberikan indikasi bahwa hasil pembangunan belum merata dirasakan masyarakat di suatu wilayah.

Selain itu, isu ketimpangan juga termasuk kedalam salah satu hal yang disoroti dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals*, yaitu pada tujuan kesepuluh. Tujuan ini menyatakan bahwa pada tahun 2030 kesenjangan atau ketimpangan di dalam dan antar negara semakin berkurang. Kesenjangan yang terjadi dapat mengancam pembangunan sosial maupun ekonomi dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif perlu diwujudkan untuk memastikan tersedianya kesempatan yang sama bagi setiap individu, sekaligus mampu menurunkan kesenjangan pendapatan.



Perekonomian Kalimantan Timur merupakan penyumbang hampir 50 persen dari total nilai tambah yang dihasilkan berbagai aktivitas ekonomi di wilayah Pulau Kalimantan. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang diciptakan kurang didukung dengan pemerataan hasil pembangunan untuk seluruh kabupaten/kota. Sebagai contoh, beberapa wilayah di Kalimantan Timur masih sulit untuk diakses karena keterbatasan infrastruktur transportasi. Sulitnya akses masuk ke suatu wilayah, menyebabkan mobilitas barang dan jasa di daerah tersebut menjadi terhambat. Hal ini dapat mengakibatkan wilayah yang sulit diakses tersebut menjadi relatif lebih tertinggal dibandingkan wilayah lain yang memiliki infrastruktur transportasi lebih baik. Selain itu, sulitnya akses menuju wilayah tersebut akan berdampak terhadap jalur distribusi barang, yang berimplikasi pada tingkat harga konsumen di wilayah tersebut menjadi relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Kondisi tersebut menciptakan ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota karena wilayah tersebut akan cenderung sulit berkembang dan tingkat harga yang sangat tinggi akan juga akan berdampak terhadap kondisi daya beli masyarakat di wilayah tersebut.

Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 10 kabupaten/kota dengan karakteristik ekonomi berbasis sumber daya alam, yaitu sektor pertanian serta sektor pertambangan dan penggalian. Meskipun terdapat kesamaan dalam hal karakteristik ekonominya, yaitu berbasis sumber daya alam, namun besaran nilai tambah yang dihasilkan cukup berbeda. Hal ini dapat dilihat dari nilai kontribusi PDRB kabupaten/kota terhadap total PDRB Provinsi Kalimantan Timur. Kontribusi PDRB tahun 2018 yang cukup tinggi dihasilkan oleh aktivitas ekonomi di beberapa kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara (25,46 persen), Kabupaten Kutai Timur (19,9 persen), dan Kota Balikpapan (15,09 persen). Sedangkan aktivitas ekonomi di Kabupaten Mahakam Ulu hanya berkontribusi sebesar 0,40 persen terhadap total PDRB Provinsi Kalimantan Timur.

Selain disparitas ekonomi, terdapat pula disparitas jumlah penduduk antar kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Hal ini terlihat dari persebaran jumlah penduduk yang belum merata di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Dari total penduduk Kalimantan Timur sebanyak 3,77 juta jiwa, hanya sekitar 32,5 ribu jiwa yang berada di Kabupaten Mahakam Ulu (atau sekitar 0,86 persen). Perbedaan jumlah penduduk ini juga yang memberikan dampak terhadap capaian kinerja pertumbuhan pembangunan di masing-masing kabupaten/kota di Kalimantan Timur.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan analisis ini antara lain:

1. Tersedianya analisis tingkat ketimpangan pendapatan Provinsi Kalimantan Timur
2. Tersedianya analisis mengenai kondisi ketimpangan antar wilayah di Provinsi Kalimantan Timur
3. Mengetahui tipologi ketimpangan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur
4. Mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur
5. Mengetahui strategi yang dapat digunakan dapat mengatasi ketimpangan di Provinsi Kalimantan Timur
6. Memberikan rekomendasi mengenai upaya untuk mengatasi ketimpangan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur



BAB II GAMBARAN UMUM KALIMANTAN TIMUR

2.5 Kondisi Geografis dan Administrasi



Gambar 2.1 Peta Kalimantan Timur

Kalimantan Timur adalah Provinsi terluas ketiga di Pulau Kalimantan setelah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, dan terluas keempat di Indonesia yaitu seluas 127.346,92 km². Adapun secara geografis, batas-batas wilayah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

- Utara : Provinsi Kalimantan Utara dan Negara Malaysia
- Selatan : Provinsi Kalimantan Selatan
- Barat : Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah
- Timur : Laut Sulawesi dan Selat Makassar

Kondisi astronomis Kalimantan Timur pada wilayah Indonesia terletak antara 2° 33' LU - 2° 25' LS dan 113° 44' BT - 119° 00' BT. Mengacu pada letak astronomis ini, Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi yang dilintasi garis khatulistiwa. Dengan posisi tersebut, secara umum wilayah Provinsi Kalimantan Timur merupakan kawasan tropis sehingga cuacanya sangat panas. Suhu di Kalimantan Timur berkisar 22 ° C hingga 37 ° C, dengan kelembaban udara rata-rata berkisar antara 74 – 87 persen. Secara umum, kondisi topografi di Kalimantan Timur berbukit-bukit dengan ketinggian berkisar antara 0 – 2.500 meter di atas permukaan air laut.



Tabel 2.1 Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Provinsi Kalimantan Timur, 2019 - 2021

Unsur Iklim	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Suhu (° C)			
Minimum	21,7	22,2	21,5
Rata-Rata	27,7	27,6	27,6
Maksimum	34,5	34,3	34,8
Kelembaban Udara (%)			
Minimum	42,0	39,0	49,0
Rata-Rata	85,7	87,0	82,0
Maksimum	100,0	100,0	100,0
Tekanan Udara (mb)			
Minimum	1 004,1	1 002,6	1 007,7
Rata-Rata	1 009,4	1 008,7	1 011,8
Maksimum	1 014,4	1 014,5	1 015,4
Kecepatan Angin (m/det)			
Rata-Rata	2,1	1,96	-
Maksimum	22,6	11,3	-
Jumlah Curah Hujan (mm)	2 367,0	4 071,6	2 887,4
Jumlah Hari Hujan (hari)	200,0	247,0	274,0
Penyinaran Matahari (%)	44,8	58,8	42,0

Catatan: Provinsi Kalimantan Timur terdapat 3 stasiun BMKG, yakni di Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Kabupaten Berau

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Kalimantan Timur

Pembagian daerah administrasi di Kalimantan Timur terdiri dari 7 kabupaten dan 3 kota. Kabupaten dengan wilayah terluas adalah Kutai Timur, mencapai 24,38 persen dari total luas wilayah Kalimantan Timur, sedangkan yang terkecil adalah Bontang yaitu hanya 0,13 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.2 Daerah Administrasi Kalimantan Timur, 2021

Kabupaten/Kota	Ibukota	Luas (km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Paser	Tanah Grogot	11 096,96	10	144
Kutai Barat	Sendawar	13 709,92	16	194
Kutai Kartanegara	Tenggarong	25 988,08	18	237
Kutai Timur	Sangata	31 051,71	18	141
Berau	Tanjung Redeb	21 735,19	13	110
Penajam Paser Utara	Penajam Paser Utara	2 923,73	4	54
Mahakam Ulu	Long Bagun	19 449,41	5	50
Balikpapan	Balikpapan	512,25	6	34
Samarinda	Samarinda	716,53	10	59
Bontang	Bontang	163,14	3	15
Kalimantan Timur	Samarinda	127 346,92	103	1 038

Sumber: Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 Tanggal 6 Mei 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 90 Tahun 2018 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2018



Keseluruhan kabupaten/kota tersebut terdiri dari 103 kecamatan dan 1.038 desa/kelurahan. Kabupaten dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak terdapat adalah Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu sebanyak 237 desa/kelurahan. Sementara itu, kabupaten dengan kecamatan terbanyak terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur, yaitu masing-masing sebanyak 18 kecamatan. Wilayah dengan jumlah kecamatan serta desa/kelurahan paling sedikit dibandingkan kabupaten/kota lainnya adalah Kota Bontang, yaitu hanya terdapat 3 kecamatan dan 15 desa/kelurahan.

2.6 Kependudukan

Berdasarkan hasil Proyeksi Interim tahun 2021, jumlah penduduk di Kalimantan Timur adalah sebanyak 3.808.235 jiwa. Dengan persentase penduduk laki-laki sebesar 52,02 persen, atau jumlahnya lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Jika dilihat persebarannya, jumlah penduduk paling banyak terdapat di Kota Samarinda, yaitu sebanyak 831.640 jiwa. Wilayah lain dengan jumlah penduduk yang cukup besar adalah Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu sebanyak 733.626 jiwa, dan Kota Balikpapan, sebanyak 695.287 jiwa.

Jika dibandingkan dengan tahun 2010, dimana jumlah penduduk adalah sebesar 3.028.487 jiwa, maka laju pertumbuhan penduduk di Kalimantan Timur tahun 2010-2021 adalah sebesar 2,09 persen. Laju pertumbuhan penduduk tercepat antara tahun 2010-2021 adalah di Kabupaten Kutai Timur yaitu sebesar 5,22 persen. Hal ini dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi di wilayah tersebut, dimana terdapat aktivitas pertambangan batubara dengan skala yang besar di Kabupaten Kutai Timur. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk yang paling rendah terjadi di Samarinda dan Kutai Kartanegara, yaitu masing-masing hanya sebesar 1,21 persen dan 1,43 persen.

Wilayah dengan kepadatan penduduk terbesar adalah di Kota Balikpapan. Dimana tingkat kepadatan penduduk adalah sebesar 1.357,32 jiwa/km², yang artinya setiap 1 km² wilayah di Kota Balikpapan dihuni oleh sekitar 1.357 jiwa penduduk. Sedangkan wilayah dengan penduduk terjarang adalah di Mahakam Ulu yang angka kepadatan penduduknya hanya 1,69 jiwa/km². Secara umum, kepadatan penduduk di Kalimantan Timur adalah 29,90 jiwa/km², menggambarkan bahwa dengan luas wilayah yang cukup besar, yaitu mencapai 128 ribu hektar, jumlah penduduk yang bermukim di wilayah Kalimantan Timur relatif sedikit.

Tingginya angka kepadatan penduduk di wilayah kota (Samarinda, Balikpapan, Bontang) disebabkan karena dengan luas wilayah yang terbatas dan perkotaan merupakan pusat bisnis atau pemerintahan. Sebagai pusat aktivitas ekonomi atau pemerintahan, maka wilayah perkotaan memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk melakukan migrasi ke kota.

Tabel 2.3 Statistik Kependudukan Provinsi Kalimantan Timur, 2021

Kabupaten/ Kota	Penduduk			Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Laju Pertumbuhan Penduduk 2010-2021 (%)
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Paser	144 555	133 047	277 602	25,02	1,70
Kutai Barat	92 090	81 892	173 982	12,69	1,97



Kutai Kartanegara	382 209	351 417	733 626	28,23	1,43
Kutai Timur	242 347	206 814	449 161	14,46	5,22
Berau	135 440	117 208	252 648	11,62	3,15
Penajam Paser Utara	93 391	87 266	180 657	61,79	2,14
Mahakam Ulu	17 524	15 445	32 969	1,69	2,53
Balikpapan	355 848	339 439	695 287	1 357,32	2,01
Samarinda	423 769	407 691	831 460	1 160,39	1,21
Bontang	93 797	87 046	180 843	1 108,51	2,10
Kalimantan Timur	1 980 970	1 827 265	3 808 235	29,90	2,09

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

2.7 Kondisi Perekonomian

2.7.1 Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengukur capaian kinerja pembangunan ekonomi. Besaran PDRB mencerminkan seluruh nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam periode tertentu. Angka PDRB juga merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur capaian target dalam dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya tujuan kedelapan, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

Pada tahun 2021, besaran PDRB Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku sebesar Rp695,16 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp87,57 triliun dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp607,59 triliun. Jika memperhitungkan jumlah penduduk, maka PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tahun 2021 adalah sebesar Rp182,54 juta. Nilai tersebut juga mengalami peningkatan sebesar 12,84 persen dibandingkan PDRB per kapita tahun 2020, yang sebesar Rp161,76 juta. Kenaikan besaran PDRB ini sebagai efek dari mulai pulihnya perekonomian seiring meningkatnya cakupan vaksinasi Covid-19 serta telah beradaptasinya masyarakat dengan berjalannya era *new normal*, setelah pada tahun sebelumnya perekonomian sempat terhantam parah oleh pandemi Covid-19 yang melanda dalam skala global.

Tabel 2.4 Perkembangan PDRB Kalimantan Timur, 2017 – 2021

Uraian	Tahun			
	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PDRB adh Berlaku (Miliar Rp)	635 498,68	652 480,26	607 586,18	695 158,33
PDRB adh Konstan 2010 (Miliar Rp)	464 694,43	486 523,18	472 554,82	484 297,35
PDRB per Kapita adh Berlaku (Juta Rp)	174,16	180,26	161,76	182,54

Uraian	Tahun			
	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PDRB per Kapita adh Konstan 2010 (Juta Rp)	127,35	134,41	125,81	127,17

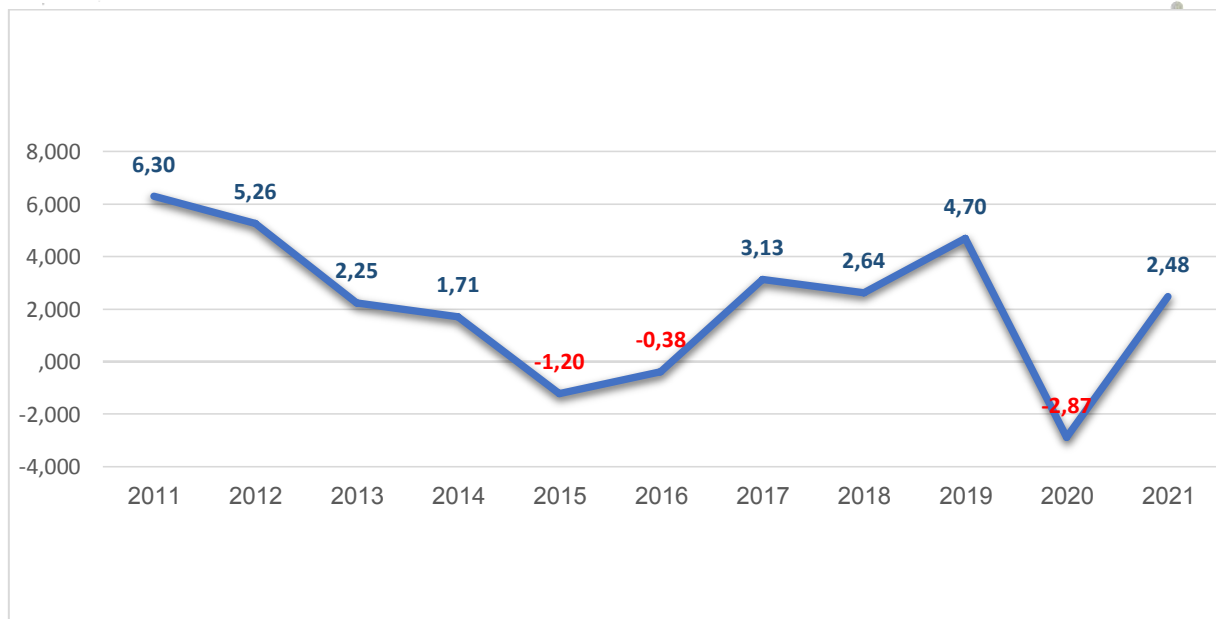
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Keterangan :

* : Angka sementara

** : Angka sangat sementara

Sementara itu, besaran laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur selama periode 2011-2021 cukup fluktuatif. Sepanjang tahun 2011 hingga 2014, pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan, kemudian mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif pada periode tahun 2015-2016. Sejak 2017 terdapat perbaikan ekonomi, dimana laju pertumbuhan Kalimantan Timur bernilai positif, sebesar 3,13 persen, walaupun sedikit melambat di tahun 2018 dengan laju pertumbuhan sebesar 2,64 persen, kemudian mengalami percepatan di tahun 2019 dengan pertumbuhan sebesar 4,74 persen. Pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak awal tahun 2020 menyebabkan penurunan kinerja berbagai sektor di dalam negeri, serta melemahkan permintaan baik dari dalam maupun luar negeri. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,85 persen jika dibandingkan tahun 2019. Beberapa kebijakan pengetatan dan pembatasan kegiatan selama pandemi Covid-19 berlangsung menyebabkan kegiatan produksi di berbagai sektor menjadi terhambat.



Sumber: BPS Kalimantan Timur

Gambar 2.2 Laju Pertumbuhan PDRB Kalimantan Timur, 2011-2020

Adapun pada tahun 2021, ekonomi Kalimantan Timur perlahan mulai kembali pulih yang ditandai dengan laju PDRB Kalimantan Timur yang kembali tumbuh positif. Meskipun tumbuh positif, namun besarnya masih belum sebesar tahun 2019 sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Pertumbuhannya masih cenderung lebih lambat jika dibandingkan dengan saat sebelum terjadinya pandemi Covid-19 (tahun 2017-2019).



a. PDRB ADHB Kalimantan Timur menurut Lapangan Usaha

Pada tahun 2020, struktur perekonomian Kalimantan Timur menunjukkan bahwa perekonomian wilayah masih mengandalkan kekayaan sumber daya alam atau sektor primer. Hal ini dilihat dari dominasi lapangan usaha sektor Pertambangan dan Penggalian dengan besaran nominal PDRB sebesar Rp251,60 triliun. Diikuti dengan sektor Industri Pengolahan, yang utamanya ditopang oleh Industri Pengilangan Migas, dengan nominal sebesar Rp114,77 triliun. Kedua sektor secara bersama menguasai hampir 60 persen perekonomian Kalimantan Timur. Sektor Pertambangan dan Penggalian memberikan kontribusi sebesar 41,43 persen terhadap total penciptaan nilai tambah di Kalimantan Timur. Sementara itu, Sektor Industri Pengolahan memiliki peranan sebesar 17,82 persen.

Tabel 2.5 Kondisi Perekonomian Kalimantan Timur menurut Lapangan Usaha, 2020-2021

Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (miliar Rupiah)		Kontribusi PDRB (%)		Laju Pertumbuhan (%)	
	2020*	2021**	2020*	2021**	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	53 468,75	58 922,90	8,80	8,48	-0,92	-0,26
B. Pertambangan dan Penggalian	250 850,97	313 164,49	41,29	45,05	-4,60	2,26
C. Industri Pengolahan	115 474,30	123 809,01	19,01	17,81	-2,86	2,29
D. Pengadaan Listrik dan Gas	385,05	395,46	0,06	0,06	11,47	2,34
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	326,37	348,04	0,05	0,05	5,28	4,19
F. Konstruksi	57 956,11	62 227,32	9,54	8,95	-1,46	4,41
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	39 233,47	41 468,04	6,46	5,97	1,04	3,77
H. Transportasi dan Pergudangan	22 196,59	23 195,36	3,65	3,34	-5,93	2,33
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6 479,40	6 653,26	1,07	0,96	-5,34	1,86
J. Informasi dan Komunikasi	9 346,48	10 183,25	1,54	1,46	7,56	7,96
K. Jasa Keuangan	10 490,25	11 244,16	1,73	1,62	2,47	2,55
L. Real Estate	5 868,85	5 868,36	0,97	0,84	0,69	-0,72
M,N. Jasa Perusahaan	1 334,84	1 380,14	0,22	0,20	-3,13	2,46
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12 750,87	13 201,13	2,10	1,90	-3,83	1,98
P. Jasa Pendidikan	11 724,05	12 340,33	1,93	1,78	2,96	2,42
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5 331,03	6 205,10	0,88	0,89	20,22	13,34
R,S,T,U. Jasa Lainnya	4 368,81	4 551,98	0,72	0,65	-3,00	1,13
PDRB	607 586,18	695 158,33	100,00	100,00	-2,87	2,48

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Keterangan :

* : Angka sementara

** : Angka sangat sementara



Setelah tumbuh negatif pada tahun 2020 akibat turunnya produksi dan kinerja ekonomi di sebagian besar lapangan usaha karena mewabahnya Covid-19, pada tahun 2021 aktivitas sebagian besar lapangan usaha di Kalimantan Timur mulai kembali normal sehingga mampu tumbuh positif dibanding tahun sebelumnya. Meskipun, untuk lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih tumbuh negatif dan lapangan usaha real estat berbalik tumbuh negatif setelah sebelumnya masih tumbuh positif.

Lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebagai lapangan usaha yang mendominasi perekonomian di Kalimantan Timur pada tahun 2021 tumbuh positif sebesar 2,26 persen. Demikian pula pada lapangan usaha industri pengolahan yang kini kembali tumbuh positif sebesar 2,29 persen setelah pada tahun sebelumnya turut tumbuh negatif. Pelonggaran pembatasan mobilitas penduduk menyebabkan mobilitas penduduk mulai bergerak kembali sehingga lapangan usaha transportasi dan pergudangan serta lapangan usaha penyedia akomodasi dan makan minum mulai tumbuh positif kembali.

Adapun lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebagai garda terdepan dalam memberikan penanganan dan pertolongan bagi masyarakat yang terkonfirmasi Covid-19 tumbuh melesat pada tahun 2020 maupun 2021, meskipun secara *share* persentasenya sangat kecil, tidak sampai 1 persen. Peningkatan signifikan pada penggunaan pulsa dan kuota data internet seiring meningkatnya aktivitas masyarakat yang harus dilakukan secara daring, seperti bekerja/sekolah dari rumah juga turut membuat sektor lapangan usaha informasi dan komunikasi tumbuh di atas 7 persen.

Jika dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi, sektor Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian merupakan sektor yang memberikan andil terbesar, yakni sebesar 1,06 persen dari total 2,48 persen pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021, sedangkan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberi andil pertumbuhan negatif terbesar, yaitu minus 0,02 persen.

b. PDRB ADHB Kalimantan Timur menurut Pengeluaran

Sebagai suatu ekonomi yang mengandalkan kinerja ekspor dari komoditas primer, dinamika perekonomian Kalimantan Timur pada tahun 2021 sangat dipengaruhi oleh dinamika permintaan atas migas dan batu bara dalam pasar global. Pada tahun 2021, komponen ekspor Kalimantan Timur mengalami pertumbuhan sebesar 2,96 persen dengan nominal PDRB sebesar Rp792,64,19 triliun. Di sisi lain, impor Kalimantan Timur sepanjang tahun 2021 juga mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, sebesar 5,43 persen dengan nominal PDRB sebesar Rp454,37 persen. Meskipun impor meningkat lebih besar dibanding ekspor pada tahun 2021, net ekspor Kalimantan Timur masih mengalami surplus, yang menandakan nilai ekspor yang lebih besar daripada nilai impor. Secara umum, komponen net ekspor pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,46 persen.

Semua komponen PDRB pengeluaran pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan positif setelah tumbuh negatif pada tahun sebelumnya. Pelonggaran pembatasan aktivitas masyarakat pada masa *new normal* membuat konsumsi mulai pulih, sehingga pada tahun 2021 meningkat dibanding tahun sebelumnya.



Tabel 2.6 Perekonomian Kalimantan Timur dari Sisi Pengeluaran, 2020-2021

Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (miliar Rupiah)		Kontribusi PDRB (%)		Laju Pertumbuhan (%)	
	2020*	2021**	2020*	2021**	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Konsumsi Rumah Tangga	111 183,75	115 437,96	18,30	16,61	(0,48)	1,20
Konsumsi LNPRT	3 250,60	3 407,57	0,54	0,49	(0,99)	0,30
Konsumsi Pemerintah	26 257,95	27 422,86	4,32	3,94	(1,95)	2,03
PMTB	188 195,89	210 237,72	30,97	30,24	(1,06)	8,03
Perubahan Inventori	1 238,58	383,59	0,20	0,06	-	-
Ekspor Barang dan Jasa	667 550,27	792 640,83	109,87	114,02	(2,93)	2,96
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	390 090,86	454 372,20	64,20	65,36	(1,30)	5,43
<i>Net Ekspor</i>	277 459,41	338 268,63	45,67	48,66	(4,53)	0,46
PDRB	607 586,18	695 158,33	18,30	16,61	(2,87)	2,48

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, diolah

Keterangan :

- * : Angka sementara
- ** : Angka sangat sementara

c. PDRB ADHB Kalimantan Timur menurut Kabupaten/Kota

Penyumbang PDRB menurut kabupaten/kota tertinggi adalah dari Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp177,32 triliun atau 25,50 persen dari total PDRB Kalimantan Timur. Selanjutnya, kabupaten yang juga cukup besar dalam memberikan kontribusi untuk menciptakan nilai tambah Provinsi Kalimantan Timur adalah Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp135,38 triliun atau sekitar 19,47 persen. Kota Balikpapan menjadi penyumbang terbesar berikutnya yakni sebesar 16,01 persen. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kalimantan Timur memang sangat didominasi oleh sektor pertambangan yang usahanya terkonsentrasi di wilayah Kutai Kartanegara dan Kutai Timur serta Industri Pengilangan Migas yang berada di Kota Balikpapan. Sedangkan penyumbang PDRB terendah adalah dari Mahakam Ulu. Salah satu faktor yang menyebabkan adalah karena Kabupaten Mahakam Ulu merupakan kabupaten yang relatif masih baru sehingga relatif belum banyak terdapat aktivitas ekonomi. Selain itu, akses menuju kabupaten ini juga relatif sulit sehingga hal tersebut juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.

Pada tahun 2021, hampir semua kabupaten/kota di Kalimantan Timur tumbuh positif, kecuali Kutai Timur dan Penajam Paser Utara akibat terganggunya aktivitas pertambangan batu bara yang sekaligus menjadi sektor utama di kedua kabupaten tersebut.

Tabel 2.7 PDRB Kalimantan Timur menurut Kabupaten/Kota, 2020-2021

Kabupaten/Kota	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (miliar Rupiah)		Kontribusi PDRB (%)		Laju Pertumbuhan (%)	
	2020*	2021**	2020*	2021**	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Paser	43 238,17	53 995,92	7,11	7,77	-2,86	5,41
Kutai Barat	27 172,54	32 092,83	4,47	4,62	-2,86	4,18
Kutai Kartanegara	149 043,58	177 318,20	24,50	25,50	-4,21	2,67



Kabupaten/Kota	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (miliar Rupiah)		Kontribusi PDRB (%)		Laju Pertumbuhan (%)	
	2020*	2021**	2020*	2021**	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kutai Timur	115 559,86	135 378,78	19,00	19,47	-3,10	-1,01
Berau	35 449,25	43 024,10	5,83	6,19	-3,32	5,36
PPU	9 052,13	10 087,32	1,49	1,45	-2,34	-1,69
Mahakam Ulu	2 765,70	2 972,54	0,45	0,43	-0,23	1,27
Balikpapan	103 838,75	111 318,50	17,07	16,01	-0,93	4,56
Samarinda	66 525,01	71 153,22	10,94	10,23	-0,99	2,76
Bontang	55 663,48	57 949,56	9,15	8,33	-2,74	1,60
Jumlah 10 Kab/Kota	608 308,47	695 290,96	100,00	100,00	-2,75	2,55
Kalimantan Timur	607 586,18	695 158,33			-2,87	2,48

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Keterangan :

* : Angka sementara

** : Angka sangat sementara

2.7.2 Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi salah satu isu pembangunan yang cukup krusial. Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) serta ditempatkan sebagai tujuan pertama, yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun. Pada September 2021, angka kemiskinan di Kalimantan Timur tercatat sebesar 6,27 persen. Besaran angka tersebut menurun dibandingkan Maret 2021 yang sebesar 6,54 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengurangan angka kemiskinan di Kalimantan Timur. Jika dipetakan menurut kabupaten/kota, pada tahun 2021, tingkat kemiskinan paling tinggi terdapat di Kabupaten Mahakam Ulu, yaitu sebesar 11,90 persen, sedangkan paling rendah terdapat di Kota Balikpapan yakni sebesar 2,89 persen.

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh jarak garis kemiskinan dari rata-rata pengeluaran penduduk miskin. Pada September 2021, nilai indeks kedalaman kemiskinan Kalimantan Timur sebesar 1,04 turun dibandingkan Maret 2021 yang sebesar 1,22.

Indeks keparahan kemiskinan (P2) merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Pada September 2021, nilai indeks keparahan kemiskinan Kalimantan Timur juga mengalami penurunan menjadi 0,23 dari 0,34 pada periode sebelumnya.



Tabel 2.8 Statistik Kemiskinan Kalimantan Timur menurut Kabupaten/Kota, 2021

Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Paser	527 659	27,56	9,73	1,37	0,32
Kutai Barat	598 037	15,38	10,24	1,07	0,21
Kutai Kartanegara	569 640	62,36	7,99	1,22	0,37
Kutai Timur	626 492	37,78	9,81	1,64	0,44
Berau	595 550	13,62	5,88	0,95	0,20
PPU	513 666	12,13	7,61	1,18	0,30
Mahakam Ulu	644 910	3,18	11,90	1,77	0,37
Balikpapan	657 521	18,53	2,89	0,50	0,15
Samarinda	750 055	42,84	4,99	1,07	0,32
Bontang	665 572	8,41	4,62	0,47	0,08
Kalimantan Timur	689 035	241,77	6,54	1,22	0,34
September 2021*	703 223	233,13	6,27	1,04	0,23
Tahun 2020	662 302	230,26	6,10	1,02	0,24

Catatan: *) Angka Kemiskinan September 2021 tersedia hanya sampai dengan level provinsi

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional

2.7.3 Ketenagakerjaan

Kelompok penduduk berumur 15 tahun ke atas merupakan kelompok penduduk yang produktif dan memiliki potensial secara ekonomi, sehingga disebut penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja di Kalimantan Timur pada tahun 2021 tercatat sebanyak lebih dari 2,8 juta jiwa. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, terdapat peningkatan penduduk usia kerja sebesar 1,60 persen.

Pada tahun 2021, angkatan kerja di Kalimantan Timur sebesar 1,846 juta penduduk. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 1,817 juta penduduk. Dari sejumlah angkatan kerja tersebut proporsi penduduk yang bekerja ada sebesar 93,17 persen, dan sisanya adalah pengangguran. Pada kelompok bukan angkatan kerja, mengurus rumah tangga memiliki proporsi yang paling besar yaitu mencapai 62,62 persen dari total bukan angkatan kerja.

Nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menggambarkan persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Tahun 2021, TPAK Kalimantan Timur sebesar 65,49 persen. Menurut kabupaten/kota, TPAK tertinggi berada di Kabupaten Mahakam Ulu yakni 74,83 persen penduduk Kabupaten Mahakam Ulu tergolong pada kelompok angkatan kerja.

**Tabel 2.9 Statistik Ketenagakerjaan Kalimantan Timur, 2019-2021**

Uraian (1)	2019 (2)	2020 (3)	2021 (4)
Penduduk Usia 15 +	2 729 544	2 775 171	2 819 565
Angkatan Kerja	1 800 441	1 817 680	1 846 547
a. Bekerja	1 693 481	1 692 796	1 720 361
b. Pengangguran	106 960	124 884	126 186
Bukan Angkatan Kerja	929 103	957 491	973 018
a. Sekolah	236 877	230 776	228 949
b. Mengurus RT	589 603	611 283	609 254
c. Lainnya	102 623	115 432	134 815

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus

Terkait ketenagakerjaan, indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi salah satu indikator dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke 8 (delapan) sebagai ukuran bagi ketersediaan pekerjaan yang layak serta penciptaan pertumbuhan ekonomi. TPT menggambarkan angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar tenaga kerja di suatu wilayah. Pada tahun 2021, TPT Kalimantan Timur sebesar 6,83 artinya dari 100 orang angkatan kerja ada sekitar 7 orang yang tidak memiliki pekerjaan atau menganggur. Jika dirinci menurut kabupaten/kota, terdapat variasi besaran nilai TPT antar wilayah kabupaten/kota. Pada tahun 2021, nilai TPT tertinggi adalah di Kota Bontang yaitu mencapai 9,92 persen. Sedangkan TPT terendah berada di Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu sebesar 2,95 persen.

Tabel 2.10 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kalimantan Timur menurut Kabupaten/Kota, 2019-2021

Kabupaten/Kota (1)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		
	2019 (2)	2020 (3)	2021 (4)	2019 (5)	2020 (6)	2021 (7)
Paser	4,38	4,52	5,70	66,17	67,88	65,35
Kutai Barat	4,89	4,97	5,14	66,76	71,02	72,53
Kutai Kartanegara	5,79	5,70	5,66	65,74	61,98	64,46
Kutai Timur	5,45	5,45	5,35	68,85	68,96	67,97
Berau	4,95	5,08	5,82	66,49	67,40	65,55
Penajam Paser Utara	6,03	6,22	2,95	64,33	69,04	66,85
Mahakam Ulu	3,56	3,49	3,14	69,91	76,22	74,83
Balikpapan	7,15	9,00	8,94	65,44	62,90	64,29
Samarinda	5,73	8,26	8,16	64,77	65,16	64,29
Bontang	9,02	9,46	9,92	68,06	69,24	66,63
Kalimantan Timur	5,94	6,87	6,83	65,96	65,50	65,49

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus



Pada tahun 2021, besaran Upah Minimum Kerja (UMK) di Kalimantan Timur adalah Rp2.981.379,-. Jika dirinci menurut kabupaten/kota, seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur memiliki besaran UMK yang lebih tinggi dibandingkan dengan besaran nilai UMK Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten dengan besaran UMK tertinggi adalah Kabupaten Berau, yaitu sebesar Rp3.412.331,-. Sedangkan kabupaten dengan besaran UMK terendah di Kalimantan Timur adalah Kabupaten Paser, yaitu sebesar

Rp3.050.000,-, namun demikian besaran nilai UMK Paser tersebut masih berada di atas nilai UMK Provinsi Kalimantan Timur.

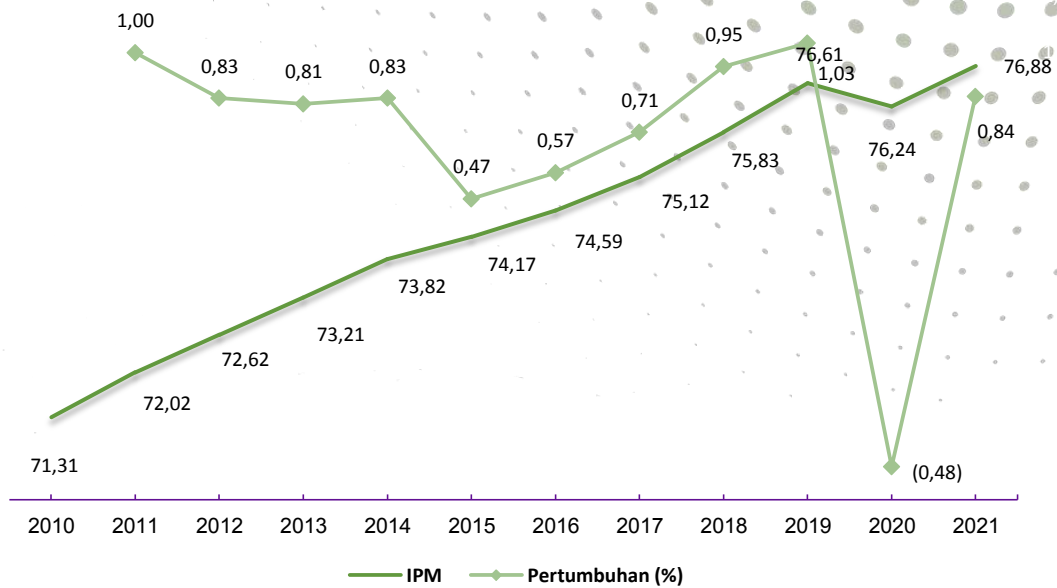
Tabel 2.11 Upah Minimum Kerja (UMK) menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, 2021

Kabupaten/Kota (1)	Upah Minimum Kabupaten/Kota (Rp) (2)
Paser	3 050 000,00
Kutai Barat	3 310 000,00
Kutai Kartanegara	3 179 673,00
Kutai Timur	3 140 098,00
Berau	3 412 331,00
Penajam Paser Utara	3 363 809,79
Mahakam Ulu	-
Balikpapan	3 069 315,66
Samarinda	3 112 156,40
Bontang	3 182 706,00
Kalimantan Timur	2 981 378,72

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur

2.8 Pembangunan Manusia

Kemajuan hasil pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka IPM mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Selama kurun waktu 2010 hingga 2019, perkembangan angka IPM di Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sempat turun di tahun 2020, IPM Kalimantan Timur kembali naik di angka 76,88 atau naik sebesar 0,84 persen di tahun 2021. Nilai IPM Kalimantan Timur termasuk ke dalam kategori tinggi bersama 2 provinsi lainnya yaitu DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Pada tahun 2021, perekonomian berangsur-angsur mulai pulih. Bersama dengan mulai pulihnya ekonomi, pendapatan masyarakat pun sudah mulai menstabil, sehingga pengeluaran masyarakat kembali meningkat setelah sempat ambruk pada tahun 2020. Secara keseluruhan, dalam kurun waktu periode tahun 2010-2021, terjadi kenaikan IPM sebesar 5,57 poin.



Sumber: BPS Kalimantan Timur

Gambar 2.3 IPM dan Pertumbuhan IPM Kalimantan Timur, 2010-2021

Jika dirinci menurut komponennya, peningkatan terjadi pada seluruh komponen penyusun IPM Kalimantan Timur. Pada tahun 2021, aspek kesehatan penduduk, yang ditunjukkan oleh indikator Usia Harapan Hidup mencapai usia 74,61 tahun, meningkat 0,28 tahun dibandingkan tahun 2019 (74,33 tahun). Variabel pendidikan yang diwakili oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, angka Harapan Lama Sekolah tercatat sebesar 13,81 tahun, lebih tinggi jika dibandingkan angka tahun 2020, yaitu 13,72 tahun. Peningkatan juga terlihat pada indikator pendidikan lainnya, yaitu Rata-rata Lama Sekolah, yang meningkat dari 9,77 tahun pada tahun 2020 menjadi sebesar 9,84 tahun pada 2021.

Selain itu, aspek kondisi ekonomi masyarakat yang diukur dengan indikator pengeluaran per kapita disesuaikan pada tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2020. Pengeluaran per kapita disesuaikan per orang per tahun di Kalimantan Timur pada tahun 2021 sebesar 12,17 juta, naik dari 11,73 juta di tahun 2020. Namun, angka ini masih lebih rendah dibandingkan tahun 2019. Hal tersebut merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang menurunkan ekonomi masyarakat di Kalimantan Timur, sehingga meskipun pemulihan ekonomi di tahun 2021 sudah mulai tampak, namun kondisinya masih belum sebaik di tahun 2019 sebelum adanya pandemi Covid-19.

Berdasarkan kabupaten/kota, angka IPM yang tinggi di Kalimantan Timur adalah untuk wilayah-wilayah kota. Di mana wilayah dengan IPM tertinggi adalah Kota Samarinda, dengan capaian sebesar 80,76, disusul oleh Kota Balikpapan (80,71 poin) dan Kota Bontang (80,59 poin). Ketiga kota tersebut berstatus “sangat tinggi” dan juga sekaligus memiliki nilai IPM yang berada di atas angka IPM Provinsi Kalimantan Timur (76,88 poin). Sedangkan kabupaten dengan angka IPM terendah adalah Kabupaten Mahakam Ulu, dengan capaian IPM sebesar 67,95.



Tabel 2.12 Statistik Pembangunan Manusia Kalimantan Timur, 2021

Kabupaten/Kota	IPM	Umur Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu/orang/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Paser	72,93	72,88	13,25	8,79	10 673
Kutai Barat	72,07	73,10	13,02	8,70	10 062
Kutai Kartanegara	74,06	72,64	13,60	9,23	11 048
Kutai Timur	73,81	73,46	12,90	9,43	10 868
Berau	75,20	72,32	13,33	9,53	12 435
PPU	72,01	71,68	12,57	8,36	11 651
Mahakam Ulu	67,95	72,33	12,61	8,18	7 802
Balikpapan	80,71	74,76	14,22	10,91	14 862
Samarinda	80,76	74,54	15,09	10,49	14 582
Bontang	80,59	74,55	13,17	10,80	16 765
Kalimantan Timur	76,88	74,61	13,81	9,84	12 116
2020	76,24	74,33	13,72	9,77	11 728
2019	76,61	74,22	13,69	9,70	12 359

Sumber: BPS Kalimantan Timur



BAB III

ANALISIS KETIMPANGAN KALIMANTAN TIMUR

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk, pada tahun 2021 penduduk Kalimantan Timur telah mencapai 3,80 juta jiwa dengan capaian nilai IPM sebesar 76,88. Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya, maka nilai IPM Kalimantan Timur tersebut termasuk ke dalam kategori “Tinggi” dan berada di atas nilai IPM Nasional, yang sebesar 72,29. Hal ini menunjukkan potensi Kalimantan Timur menjadi suatu wilayah yang memiliki keunggulan terkait pembangunan manusia jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia.

Selain itu, dari sisi ekonomi, penciptaan kue ekonomi yang ditunjukkan oleh kue PDRB Kalimantan Timur juga cukup besar. Pada tahun 2021, PDRB Kalimantan Timur mencapai Rp695,16 triliun dan menyumbang setengah dari porsi perekonomian di regional Kalimantan sebesar 49,66 persen. Selain itu, besaran angka kemiskinan di Kalimantan Timur pada tahun 2021 sebesar 6,54 persen, berada di bawah angka nasional (sebesar 10,14 persen). Hal ini juga menunjukkan bahwa terdapat capaian kinerja yang cukup baik dari aspek ekonomi dan sosial wilayah Kalimantan Timur.

Dengan capaian-capaian tersebut, masih terdapat beberapa permasalahan pembangunan yang masih perlu diselesaikan, seperti masalah ketimpangan, seperti ketimpangan gender. Pengukuran kondisi ketimpangan gender, salah satunya dilakukan melalui indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan juga Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Pada tahun 2021, nilai IPG Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar 85,96 dan nilai IDG sebesar 66,64. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun gambaran pembangunan manusia secara umum di Kalimantan Timur sudah cukup baik, namun masih terdapat masih terdapat perbedaan capaian kualitas pembangunan laki-laki dibandingkan capaian pembangunan manusia perempuan di wilayah Kalimantan Timur.

Permasalahan lain dalam kaitan dengan ketimpangan pembangunan di wilayah Kalimantan Timur seperti ketimpangan pendapatan, ketimpangan antar wilayah kabupaten/kota dan ketimpangan produktivitas tenaga kerja di Kalimantan Timur. Kemunculan pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 juga menambah permasalahan ketimpangan di wilayah ini.

3.4 Ketimpangan Pendapatan

Beberapa waktu terakhir, terdapat pergeseran paradigma terkait dengan pembangunan wilayah. Dari pandangan bahwa kegiatan pembangunan yang dilakukan lebih berorientasi kepada penciptaan pertumbuhan ekonomi (peningkatan nilai PDRB) saja, menjadi pandangan baru dimana pembangunan yang berorientasi kepada penciptaan kualitas hidup (*quality of life*) yang lebih baik. Salah satu indikator perubahan paradigma tersebut adalah terdapat gerakan pelestarian lingkungan hidup dalam setiap upaya pembangunan. Gerakan tersebut bertujuan untuk menciptakan kesinambungan dalam pembangunan (*sustainable development*), sehingga hasil pembangunan tidak saja dinikmati oleh generasi saat ini, akan tetapi juga dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya.

Dengan munculnya paradigma *sustainable development*, aspek lain yang juga perlu diperhatikan dalam pembangunan adalah menjamin bahwa hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat pada masa sekarang. Hal ini berarti bahwa jika pembangunan menciptakan pertumbuhan ekonomi di suatu



wilayah, sebagai satu indikator capaian pembangunan, perlu diperhatikan pula apakah manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, jika terdapat peningkatan *output* ekonomi suatu wilayah seharusnya dibarengi dengan adanya pembagian porsi pendapatan yang merata di antara para pelaku ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan memperbesar kapasitas ekonomi suatu negara. Dengan semakin meningkatnya kapasitas ekonomi, maka diharapkan akan tercipta *trickle down effect*, yaitu manfaat positif dari pertumbuhan ekonomi juga akan diterima oleh masyarakat yang relatif berpendapatan lebih rendah, sehingga kesejahteraan seluruh masyarakat akan meningkat. Namun, kondisi tersebut sering kali tidak dapat tercapai.

Beberapa studi menunjukkan bahwa ketimpangan di suatu wilayah memberikan dampak terhadap kondisi makroekonomi, khususnya pertumbuhan ekonomi. Banerjee dan Duflo (2003) menyatakan bahwa ketimpangan merupakan faktor penghambat pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, Berg dan Ostry (2011) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di suatu wilayah sangat erat kaitannya dengan kondisi ketimpangan yang relatif rendah di wilayah tersebut. Bahkan studi yang dilakukan Dabla-Norris dkk. (2015) menyatakan bahwa distribusi pendapatan merupakan faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi. Jika proporsi pendapatan dari kelompok berpendapatan tinggi meningkat, maka terjadi penurunan besaran persentasi pertumbuhan ekonomi pada jangka menengah. Sebaliknya, jika terdapat peningkatan proporsi pendapatan dari kelompok terendah, maka besaran pertumbuhan ekonomi akan meningkat.

Ketimpangan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi melalui beberapa mekanisme (Jain-Chandra, 2016), diantaranya adalah melalui aspek ekonomi politik. Ketimpangan pendapatan menyebabkan peningkatan instabilitas politik, akibatnya dapat menghambat kegiatan investasi dan pertumbuhan ekonomi, serta menyebabkan menurunnya kemampuan pemerintah dalam merespon *shock* yang terjadi di wilayahnya. Selain itu, ketimpangan juga menimbulkan keterbatasan untuk memperoleh kredit yang berakibat rendahnya aktivitas investasi bagi pembentukan modal SDM dan juga kesehatan, serta menghambat kesempatan berusaha. Pada beberapa studi, ketimpangan juga ditemui sebagai salah satu penyebab terjadinya krisis dan instabilitas ekonomi dan keuangan. Sebagai contoh, ketimpangan menciptakan tekanan politis untuk melakukan kebijakan pembiayaan perumahan bersubsidi, yang berpotensi berdampak kepada terjadinya krisis keuangan.

Selain ketimpangan, isu pembangunan lainnya adalah kemiskinan. Dalam paradigma *Sustainable Development*, pandangan bahwa hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat mengandung arti bahwa tidak ada yang tertinggal atau "*to leave no one left behind*", artinya bahwa kemiskinan harus ditiadakan. Secara bersama-sama, indikator kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan merupakan tiga ukuran yang dapat menjelaskan mengenai capaian kinerja pembangunan suatu negara. Harapannya adalah pertumbuhan ekonomi yang tercipta dapat mengurangi kemiskinan, dan pada akhirnya dapat memperbaiki distribusi pendapatan suatu wilayah.

Analisis hubungan antara ketiga hal tersebut telah menjadi bahan perdebatan yang panjang dan sangat menarik terutama pada pemilihan strategi pembangunan ekonomi dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pilihan pertama, apakah lebih mendahulukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan mengesampingkan pemerataan distribusi pendapatan. Kedua, apakah lebih mengutamakan distribusi pendapatan yang lebih merata dengan mengorbankan pertumbuhan ekonomi, atau yang ketiga,



apakah lebih mengutamakan distribusi pendapatan yang lebih merata tanpa harus mengorbankan pertumbuhan ekonomi.

Pendapatan per kapita yang tinggi di suatu wilayah tidak menjamin semua masyarakat hidup makmur. Oleh sebab itu diperlukan suatu alat ukur yang dapat melihat apakah seluruh pendapatan di suatu wilayah telah terdistribusi secara merata. Untuk mengukur kondisi ketimpangan pendapatan suatu wilayah digunakan Indeks Gini (*Rasio gini*). Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan yang paling umum digunakan. Indeks gini mengukur derajat ketimpangan distribusi pendapatan suatu wilayah untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat kesenjangan sosial di masyarakat. Jika rasio gini mendekati 0, berarti distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya, jika mendekati 1, berarti distribusi pendapatan semakin tidak merata.

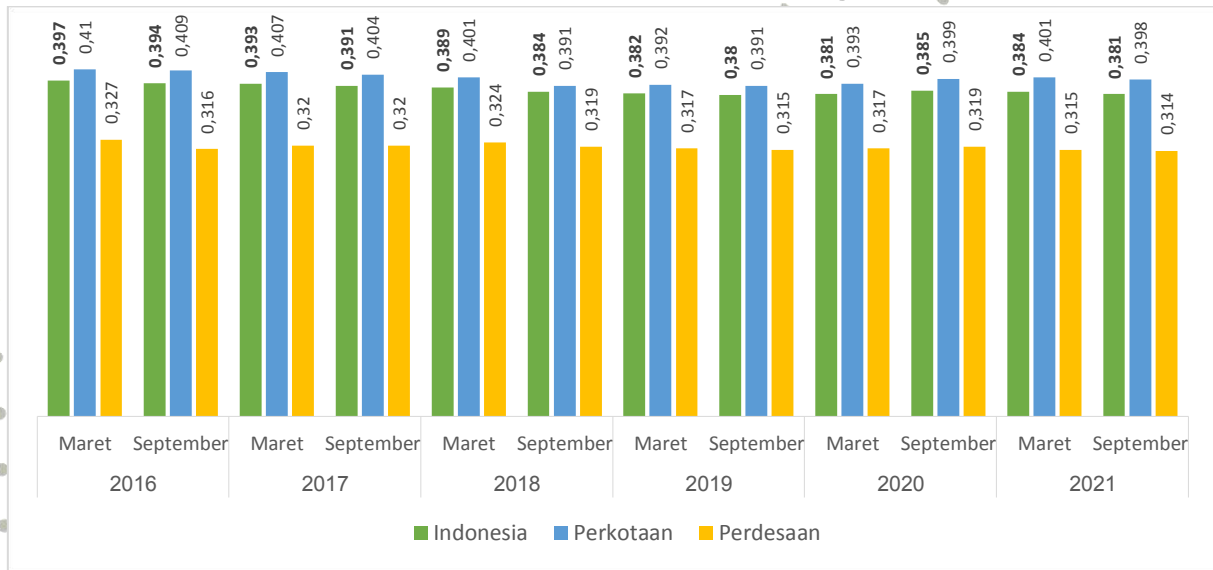
Ketimpangan Pendapatan di Indonesia

Permasalahan utama dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia saat ini terkait dengan adanya fakta bahwa pertumbuhan ekonomi tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia, ditandai dengan Indeks Gini nasional sebesar 0,381 pada September 2021 dan menempatkan Indonesia pada negara dengan ketimpangan sedang menurut klasifikasi Bank Dunia. Pandemi Covid-19 juga berdampak pada penurunan pendapatan seluruh lapisan masyarakat. Indeks gini bulan September 2021 tercatat sebesar 0,381 menurun jika dibandingkan Maret 2021 sebesar 0,384. Penurunan pendapatan pada masyarakat kelompok bawah tercatat lebih tajam dibandingkan dengan kelompok masyarakat atas. Hal ini menjadi penyebab makin lebarnya ketimpangan pendapatan di Indonesia. Kenaikan indeks gini mengindikasikan ketimpangan pendapatan yang memburuk. Menurunnya tren indeks gini pada September 2021 dibandingkan Maret 2021 diharapkan terus berlanjut sehingga membawa Indonesia pada jajaran negara dengan tingkat ketimpangan rendah.

Pada September 2021, provinsi yang mempunyai nilai Indeks Gini tertinggi tercatat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sebesar 0,436 sementara yang terendah tercatat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Indeks Gini sebesar 0,247. Secara mengejutkan, provinsi terbaru Indonesia, yang *notabene* adalah pecahan Provinsi Kalimantan Timur, yakni Kalimantan Utara mempunyai Indeks Gini yang jauh lebih rendah dari Provinsi Induknya. Kalimantan Utara tercatat mempunyai Indeks Gini sebesar 0,285, yang merupakan indeks terendah ketiga di Indonesia. Dibanding dengan Indeks Gini nasional yang sebesar 0,381, Kalimantan Timur termasuk provinsi dengan Indeks Gini yang lebih rendah. Indeks Gini Provinsi Kalimantan Timur pada September 2021 mencapai 0,331. Bila mengacu pada kategori Indeks Gini yang disebutkan sebelumnya, maka Indeks Gini Provinsi Kalimantan Timur termasuk dalam kategori sedang.

Sejak tahun 2016, ketimpangan di Indonesia tercatat mengalami penurunan walaupun lambat. Penurunan tingkat ketimpangan ini menurut BPS disebabkan oleh kenaikan yang lebih cepat pada pengeluaran per kapita per bulan untuk penduduk kelompok 40 persen terbawah dibandingkan penduduk kelompok 40 persen menengah dan kelompok 20 persen teratas. Jika dipilah menurut wilayah, yaitu perkotaan dan perdesaan, terlihat bahwa penurunan ketimpangan di daerah perkotaan lebih cepat dibandingkan di wilayah perdesaan. Gambar 3.1 menunjukkan bahwa selama tahun 2016-2021, kecepatan penurunan ketimpangan di daerah perdesaan lebih cepat dibanding perkotaan. Jika di perkotaan selama kurun waktu tersebut Indeks Gini hanya mampu turun sebesar 0,009 poin,

namun di wilayah perdesaan mampu turun 0,012 poin. Namun demikian, secara nilai terlihat bahwa penduduk di wilayah perkotaan memiliki kondisi ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk di wilayah perdesaan.



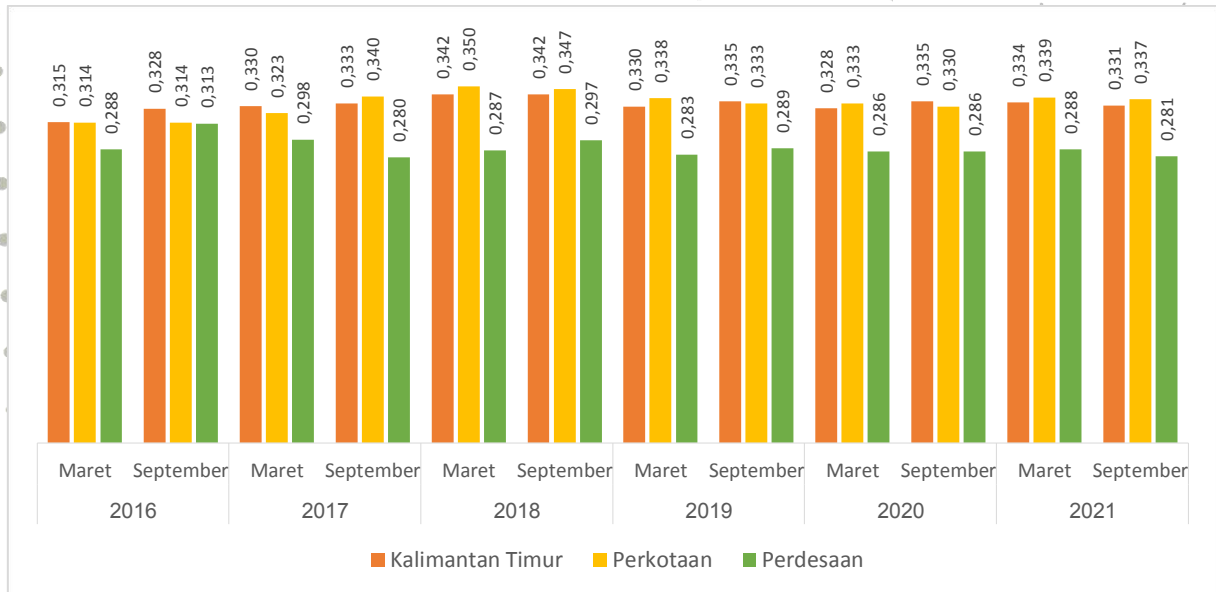
Sumber: BPS Kalimantan Timur

Gambar 3.1 Indeks Gini Indonesia Menurut Tipe Wilayah, Tahun 2016-2021

Tingginya tingkat ketimpangan perkotaan dibanding perdesaan memang lazim terjadi di negara sedang berkembang. Pada tahap awal perkembangan suatu wilayah, pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi cenderung menimbulkan terjadinya ketimpangan. Hal ini sejalan dengan munculnya aglomerasi aktivitas ekonomi pada suatu wilayah yang berdampak pada peningkatan standar hidup layak di suatu wilayah. Pada kondisi tersebut, masyarakat yang telah memiliki standar hidup yang baik, misalnya dalam hal pendidikan atau keterampilan, akan dapat memperoleh peluang dari dinamika perkembangan wilayah tersebut. Di sisi lain, terdapat sebagian masyarakat yang mungkin tidak dapat merespons secara cepat perubahan di wilayah tersebut karena keterbatasan terhadap akses pendidikan/keterampilan dan tidak memiliki kompetensi untuk dapat meraih peluang tersebut, yang berakibat kepada timbulnya ketimpangan di wilayah tersebut.

Ketimpangan Pendapatan di Kalimantan Timur

Secara nasional, terdapat perbaikan distribusi pendapatan masyarakat. Namun demikian, perbaikan tersebut tidak dialami masyarakat di wilayah Kalimantan Timur. Walaupun sejak tahun 2016 tingkat ketimpangan pendapatan di Kalimantan Timur terus meningkat, bahkan kenaikannya mencapai 0,027 poin dari 0,315 pada Maret 2016 menjadi 0,342 pada tahun 2018, namun pada Maret 2020 menurun menjadi 0,328. Perbaikan ketimpangan di Kalimantan Timur ini ternyata tidak bertahan lama, karena pada periode September 2020 indeks giniya naik tipis menjadi 0,335 dan kembali membaik 0,04 poin menjadi 0,331 pada September 2021. Artinya, kesenjangan pengeluaran di Provinsi Kalimantan Timur semakin lebar dalam kurun waktu 2016-2020.



Sumber: BPS Kalimantan Timur

Gambar 3.2 Indeks Gini Kalimantan Timur, Tahun 2016-2021

Jika dibandingkan menurut wilayah tempat tinggal, pola ketimpangan di Provinsi Kalimantan Timur sama dengan nasional, dimana indeks gini daerah perkotaan jauh lebih tinggi dari daerah perdesaan. Tercatat, pada September 2021 ketimpangan perkotaan mencapai 0,337 sedangkan untuk daerah perdesaan 0,281. Rendahnya indeks gini di daerah perkotaan tidak serta merta dapat menggeneralisasi bahwa kesejahteraan di daerah perdesaan lebih baik. Hal ini lebih menggambarkan keberagaman pekerjaan di daerah perkotaan yang lebih tinggi dibandingkan perdesaan, yang mengakibatkan *gap* antar lapisan penduduk diperkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan.

Indeks gini yang tinggi menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan. Namun demikian, hal tersebut juga tidak selalu diartikan buruk. Dengan adanya ketimpangan, terdapat insentif bagi pekerja untuk bekerja keras dalam rangka meningkatkan produktivitas serta melakukan inovasi dalam menciptakan produk yang digunakan oleh masyarakat. Sebaliknya, bagi pekerja yang kurang bekerja keras, maka peluang untuk dapat memperoleh insentif akan semakin sulit diperoleh.

Kondisi ketimpangan secara tidak langsung menunjukkan bahwa tidak semua orang memiliki peluang yang sama dalam mengakses layanan masyarakat terutama pelayanan kesehatan dan pendidikan yang merupakan modal dasar untuk mendapatkan penghasilan dan penghidupan yang layak. Akibat yang ditimbulkan dengan adanya ketimpangan akan membuat kondisi masyarakat menjadi rentan terhadap konflik yang disebabkan adanya kecemburuan sosial. Konflik di masyarakat akan



mengganggu distribusi barang dan jasa sehingga menurunkan jumlah produksi dan mengurangi tingkat investasi, sehingga pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu daerah secara umum.

Untuk memahami apa yang mendorong ketimpangan di Kalimantan Timur meningkat, perlu dipahami sumber daya apa saja yang dimiliki oleh rumah tangga dan bagaimana mereka menggunakan sumber daya tersebut untuk menghasilkan pendapatan. Menurut *World Bank* (2016) ada empat pendorong utama ketimpangan yang mempengaruhi generasi sekarang maupun masa depan.

Pertama, ketimpangan peluang, yang terjadi akibat faktor di luar kendali individu pada saat lahir. Sepertiga ketimpangan konsumsi di Indonesia disebabkan oleh sejumlah kecil faktor di luar kendali individu, terutama faktor pendidikan orang tua dan tempat di mana mereka lahir. Hal ini kemudian berdampak kepada munculnya kesenjangan dalam akses kesehatan, sanitasi dan akses pendidikan.

Kedua, dengan semakin besarnya tuntutan untuk memiliki keterampilan yang tepat dalam ekonomi modern, imbalan bagi mereka yang berhasil mendapatkan pekerjaan bagus semakin tinggi. Sementara mereka yang tidak punya keterampilan yang dibutuhkan, terjebak dalam pekerjaan informal atau pekerjaan dengan produktivitas dan upah rendah. Jika kedua faktor ini digabungkan maka ketimpangan upah meningkat.

Ketiga, semakin terpusatnya sumber daya keuangan di tangan segelintir rumah tangga kaya menimbulkan ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi saat ini dan memperkuat ketimpangan sumber daya manusia dan keuangan pada generasi berikutnya. Keempat, guncangan (*shock*), dapat mempengaruhi ketimpangan pada tahap mana pun dengan cara mengikis kemampuan rumah tangga untuk mendapatkan penghasilan, menabung, dan berinvestasi pada kesehatan dan pendidikan.

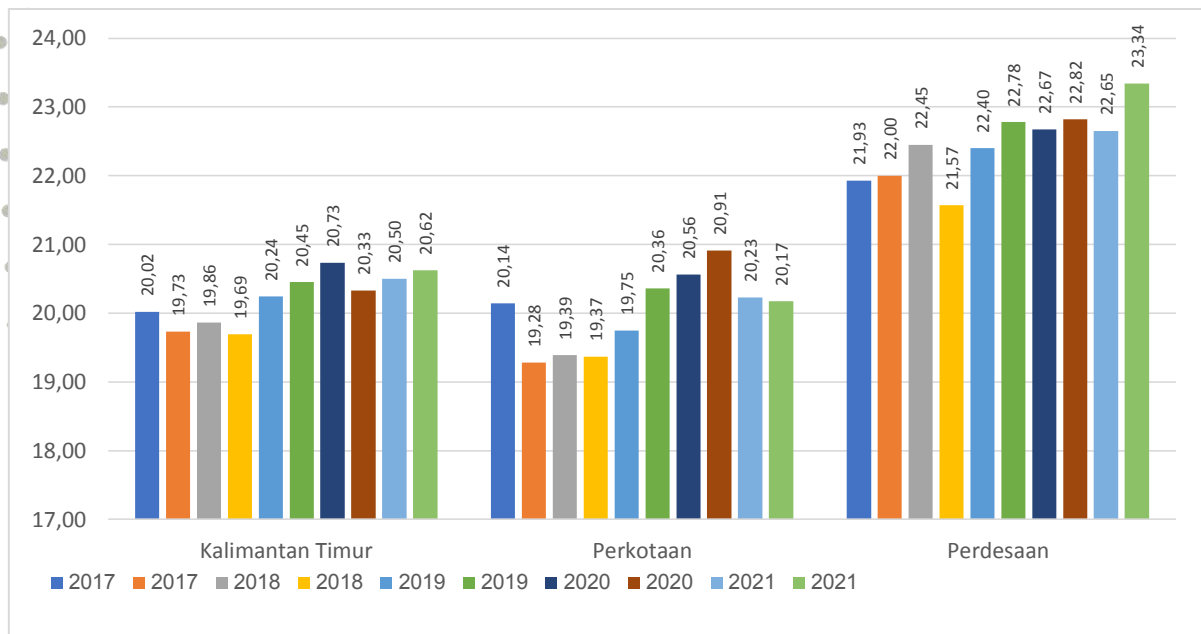
Selain ukuran Indeks Gini, *World Bank* mengeluarkan ukuran ketimpangan lain yang mengacu pada besarnya jumlah pengeluaran, sebagai *proxy* dari ukuran pendapatan rumah tangga, untuk penduduk yang berada pada kelompok 40 persen dengan pendapatan terendah. Jika besaran persentase pengeluaran penduduk pada tersebut lebih kecil dari 12 persen, maka dikatakan bahwa terdapat ketimpangan tinggi. Sementara itu, jika proporsi pengeluaran kelompok tersebut berkisar 12 hingga 17 persen, maka dikatakan bahwa di wilayah tersebut terdapat ketimpangan pendapatan pada kategori sedang atau menengah. Sedangkan jika proporsi pengeluaran yang dilakukan oleh kelompok penduduk tersebut mencakup lebih besar daripada 17 persen dari total pengeluaran penduduk di wilayah tersebut, maka wilayah tersebut disebut memiliki tingkat ketimpangan yang rendah.

Gambar 3.3 menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2017 hingga 2021 terlihat bahwa proporsi pengeluaran dari kelompok penduduk dengan pendapatan 40 persen terendah lebih dari 19 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ketimpangan pendapatan yang ada di Kalimantan Timur termasuk kedalam kategori rendah. Bahkan pada periode Maret 2020 tercatat bahwa proporsi pengeluaran pada kelompok penduduk tersebut sebesar 20,73 persen. Namun setelah terjadi pandemi Covid-19, persentase ini pun mengalami *shock* menjadi 20,33 persen pada September 2020. Penangan pandemi yang diusahakan dari seluruh lapisan masyarakat membuahkan hasil setidaknya pada masyarakat dengan pengeluaran 40 persen terbawah yang mulai membaik menjadi 20,62 persen pada September 2021.

Lebih lanjut, terdapat peningkatan proporsi pengeluaran pada kelompok penduduk dengan pendapatan 40 persen terendah. Persentase pengeluaran pada kelompok penduduk tersebut pada

bulan September 2021 ini lebih besar jika dibandingkan dengan kondisi sejak Maret 2017. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat perbaikan pemerataan pendapatan di Kalimantan Timur.

Namun demikian, jika dirinci menurut daerah tempat tinggal, terlihat perbedaan kondisi ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Besaran proporsi pengeluaran untuk penduduk dengan pendapatan 40 persen terendah di wilayah perkotaan lebih kecil dibandingkan dengan proporsi pengeluaran kelompok penduduk yang sama yang berada di wilayah pedesaan. Pada September 2021, proporsi pengeluaran penduduk dengan pendapatan 40 persen terendah di wilayah perkotaan hanya sebesar 20,17 persen, sedangkan di daerah pedesaan tercatat sebesar 23,34 persen. Hal ini menggambarkan bahwa secara umum kedua wilayah tersebut memiliki ketimpangan yang rendah, namun wilayah pedesaan memiliki keunggulan dalam hal pemerataan pendapatan dibandingkan wilayah perkotaan.

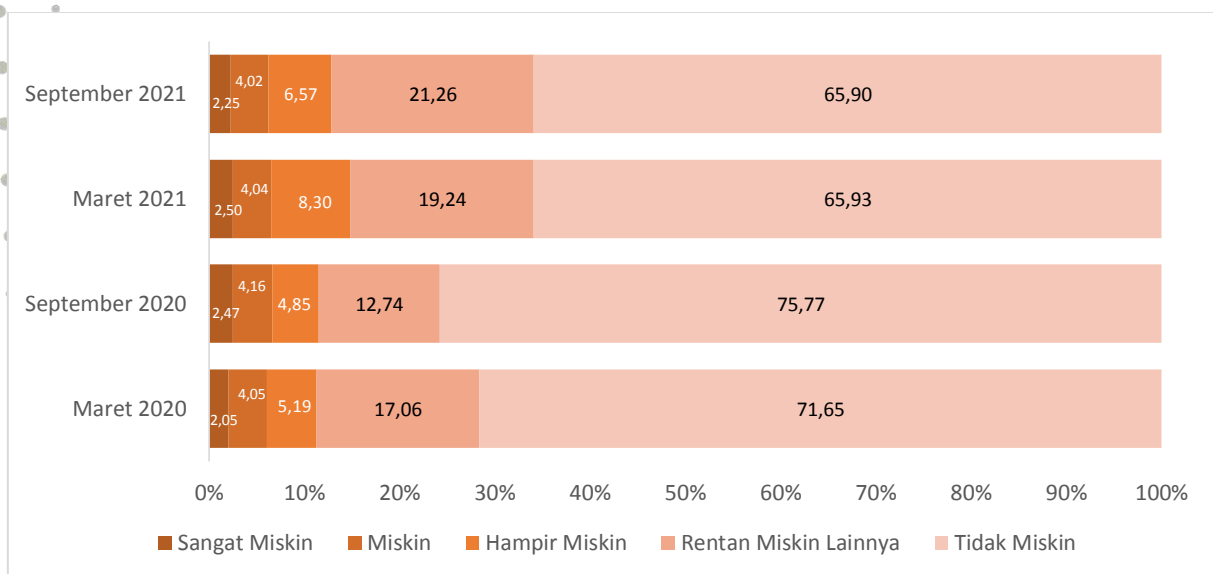


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 3.3 Perkembangan Persentase Pengeluaran Kelompok 40 Persen Terendah Kalimantan Timur, Maret 2017- September 2021

Gambaran mengenai perkembangan kelompok penduduk dengan pendapatan 40 persen terendah, secara tidak langsung juga memberikan informasi terkait dengan gambaran kondisi pada penduduk miskin di suatu wilayah. Penduduk miskin di suatu wilayah merupakan bagian dari kelompok penduduk yang memiliki pendapatan terendah. Tercatat pada September 2021, persentase penduduk miskin Kalimantan Timur sebesar 6,27 persen. Jika dibandingkan periode September 2020, yang tercatat sebesar 6,64 persen, angka tersebut menunjukkan adanya penurunan angka kemiskinan. Namun jika dilakukan pemilahan untuk kelompok penduduk sangat miskin, miskin, hampir miskin dan tidak miskin, maka terlihat bahwa penduduk sangat miskin pada September 2021 mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya (September 2020), setelah pada September 2020 mengalami peningkatan jika dibandingkan Maret 2021. Pada September 2020, proporsi penduduk sangat miskin adalah sebesar 2,47 persen, mengalami peningkatan pada Maret 2021, yaitu menjadi sebesar 2,50 persen dan kembali menurun menjadi 2,25 persen pada September 2021

Selain itu, perkembangan kondisi kelompok penduduk yang termasuk kedalam rentan miskin juga perlu diperhatikan. Penduduk rentan miskin adalah penduduk yang besaran nilai pendapatannya telah berada diatas batas garis kemiskinan, namun belum sepenuhnya aman, karena kondisinya sangat dipengaruhi oleh adanya *shock* dalam perekonomian. Penduduk pada kategori ini akan mudah jatuh kedalam jurang kemiskinan jika perekonomian diguncang *shock*, walaupun kecil. Pada September 2021, masih terdapat 21,26 persen penduduk yang termasuk dalam kategori ini. Jika dibandingkan *year on year* dengan angka pada September 2020, yakni sebesar 12,74 persen, maka terdapat kenaikan proporsi penduduk rentan miskin. Hal tersebut menunjukkan bahwa di Kalimantan Timur terjadi peningkatan proporsi penduduk yang rawan terhadap *shock* dalam ekonomi. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang dapat memberikan jaminan bahwa penduduk, terutama yang berada pada kelompok rentan miskin, tidak terpengaruh atau tidak kembali menjadi penduduk miskin ketika guncangan dalam ekonomi terjadi di Kalimantan Timur.



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 3.4 Perkembangan Penduduk Miskin menurut Kriteria, Maret 2020-September 2021



3.2 Kondisi Ketimpangan Antar Wilayah (Indeks Williamson)

Ketimpangan wilayah terjadi akibat pertumbuhan ekonomi tidak diikuti pemerataan ekonomi sehingga kegiatan ekonomi terkonsentrasi pada suatu wilayah. Terlihat dengan adanya wilayah yang maju dan terbelakang atau kurang maju. Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Menurut Sjafrizal (2012), beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah, yaitu perbedaan kandungan sumber daya alam, perbedaan kondisi geografis, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, serta alokasi dana pembangunan antar wilayah.

Ketimpangan pembangunan telah memberikan berbagai dampak terhadap daerah dan masyarakat. Berapa indikator yang menunjukkan ketimpangan antar wilayah adalah terdapat wilayah yang proses pembangunan infrastrukturnya, seperti infrastruktur pendidikan dan kesehatan, yang masih relatif tertinggal dibandingkan wilayah lain. Kondisi tersebut mengakibatkan wilayah yang ketersediaan infrastrukturnya kurang akan sulit untuk diakses sehingga berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan wilayah tersebut menjadi terhambat (Bappenas, 2016). Bentuk kesenjangan wilayah lain yang sering dijumpai adalah terdapat kesenjangan antara wilayah kota dan desa. Pada wilayah perkotaan, dimana infrastrukturnya sudah lebih baik, maka terdapat konsentrasi aktivitas ekonomi, sehingga terdapat kecenderungan tingginya jumlah penduduk karena infrastruktur pemukiman, seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan, relatif lebih banyak tersedia dibandingkan di wilayah pedesaan.

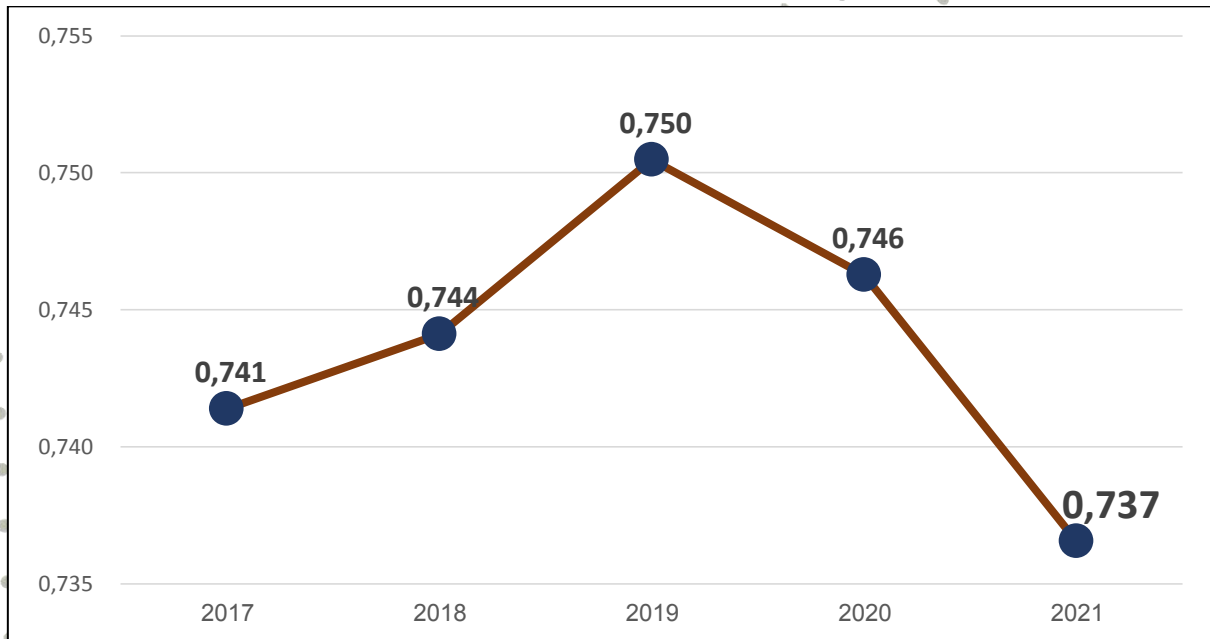
Dampak utama dari ketimpangan pembangunan adalah timbulnya masalah sosial di masyarakat, seperti pengangguran, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Dampak tersebut merupakan muncul akibatnya kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan di wilayah yang kinerja pembangunan tidak cukup baik. Tingginya angka pengangguran di suatu wilayah cenderung akan diikuti oleh terjadinya kemiskinan. Pada akhirnya, kemiskinan yang terjadi di masyarakat pada suatu wilayah akan mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya manusia generasi berikutnya, karena kesulitan untuk dapat mengakses fasilitas pendidikan akibat rendahnya pendapatan masyarakat.

Selain Indeks Gini, untuk mengukur kondisi ketimpangan wilayah digunakan indikator Indeks Williamson. Indeks tersebut merupakan satu instrumen dalam pengukuran pembangunan wilayah dengan membandingkannya dengan cakupan wilayah yang lebih besar. Berbeda dengan Indeks Gini, yang mengukur ketimpangan vertikal, yaitu ketimpangan antara kelompok berpendapatan tertinggi dan terendah, Indeks Williamson merupakan ukuran ketimpangan horizontal. Indeks Williamson yang digunakan pada analisis ketimpangan ini menggunakan pendapatan per kapita suatu wilayah, produktivitas PDRB Per Kapita dan jumlah penduduk di wilayah tersebut. Interpretasi dari hasil Indeks Williamson adalah apabila indeks mendekati 1 (satu) berarti terjadi ketimpangan yang tinggi, sebaliknya jika mendekati 0 (nol) berarti pendapatan masyarakat antar wilayah relatif merata.

Kondisi Ketimpangan Antar Wilayah di Indonesia

Pada tahun 2021, Indeks Williamson Indonesia tercatat sebesar 0,737, mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 0,746. Meskipun mengalami penurunan, namun angka tersebut masih terbilang tinggi. Tingginya Indeks tersebut menunjukkan bahwa di wilayah Indonesia terdapat ketimpangan antar wilayah yang cukup tinggi. Lebih lanjut, selama periode 2017 hingga 2021, nilai Indeks Williamson untuk wilayah antarprovinsi Indonesia menunjukkan angka di atas 0,70.

Nilai tersebut masih mengindikasikan bahwa selama periode tersebut disparitas antar provinsi di Indonesia belum mengalami perubahan yang signifikan dan masih berada pada posisi ketimpangan yang cukup tinggi.



Sumber: BPS, diolah

Gambar 3.6 Indeks Williamson PDRB Per Kapita Antar Provinsi di Indonesia

Salah satu faktor penyebab tingginya disparitas antar provinsi atau wilayah di Indonesia adalah akibat terjadinya konsentrasi kegiatan perekonomian maupun pembangunan, yang masih terpusat di beberapa wilayah saja di Indonesia, terutama Pulau Jawa. Hal ini dapat dilihat dari ukuran nilai PDRB yang dihasilkan oleh aktivitas ekonomi di masing-masing wilayah. Jika dijumlahkan, nilai PDRB dari Pulau Jawa mencapai lebih dari separuh total nilai perekonomian Indonesia. Angka tersebut juga memberikan gambaran mengenai ketersediaan infrastruktur ekonomi di Pulau Jawa yang lebih baik dibandingkan wilayah lainnya, sehingga biaya untuk melakukan kegiatan ekonomi relatif lebih murah dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia.

Jika dilihat dari angka PDRB per kapita pada masing-masing provinsi di Indonesia, terlihat bahwa selama tahun 2021 terdapat beberapa provinsi yang memiliki PDRB per kapita yang sangat tinggi (lebih dari Rp100 juta per tahun) dan sebaliknya terdapat beberapa provinsi yang PDRB per kapitanya cukup rendah (kurang dari Rp50 juta per tahun). Adapun beberapa provinsi yang memiliki PDRB per kapita sangat tinggi adalah DKI Jakarta, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Jika dicermati, kecuali DKI Jakarta, provinsi-provinsi dengan nilai PDRB per kapita yang tinggi tersebut merupakan wilayah yang karakteristik ekonominya berbasis sumber daya alam yang tidak terbarukan. Pada jangka pendek di mana ketersediaan sumber daya relatif masih berlimpah, maka eksploitasi dari SDA tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi. Namun, untuk jangka panjang seiring dengan berkurangnya cadangan SDA tidak terbarukan, maka besaran nilai PDRB per kapita pada provinsi-provinsi tersebut akan cenderung menurun, akibatnya pertumbuhan ekonomi wilayah tidak dapat berkelanjutan.



Tabel 3.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita (Ribu Rupiah)

PROVINSI (1)	2017 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020* (5)	2021** (6)
Aceh	28 096,71	29 521,25	30 879,06	31 633,38	34 680,46
Sumatera Utara	48 003,60	51 427,49	54 620,40	54 979,04	57 569,79
Sumatera Barat	40 194,29	42 802,66	44 885,51	43 843,67	45 293,75
Riau	105 844,77	110 384,90	111 227,01	114 331,74	129 852,59
Jambi	53 993,40	58 224,89	60 828,86	58 285,73	65 193,22
Sumatera Selatan	46 315,05	50 104,67	53 359,10	54 084,41	57 487,44
Bengkulu	31 359,49	33 822,13	36 565,29	36 552,50	39 143,43
Lampung	36 998,32	39 716,46	42 172,32	39 346,53	40 950,42
Kep. Bangka Belitung	48 827,25	50 081,95	52 232,80	52 006,52	58 338,81
Kep. Riau	109 332,85	116 461,40	119 394,66	123 529,18	130 125,23
DKI Jakarta	228 002,73	247 678,49	268 052,25	262 702,12	274 709,59
Jawa Barat	37 223,11	40 272,64	43 309,19	43 288,70	45 299,58
Jawa Tengah	34 234,31	36 770,96	39 388,15	36 983,99	38 669,11
DI Yogyakarta	31 664,92	34 136,93	36 459,73	37 745,22	40 229,83
Jawa Timur	51 228,45	55 410,61	59 015,17	56 640,41	60 043,33
Banten	45 275,58	48 370,15	52 013,99	52 736,47	55 210,65
Bali	50 167,07	54 433,45	57 755,96	51 940,10	50 381,21
Nusa Tenggara Barat	24 986,54	24 705,97	25 716,11	25 183,55	26 002,48
Nusa Tenggara Timur	17 165,45	18 417,54	19 630,02	20 056,71	20 581,13
Kalimantan Barat	35 984,53	38 814,73	42 045,41	39 631,76	42 282,90
Kalimantan Tengah	48 293,22	52 107,23	56 625,38	57 145,07	62 912,85
Kalimantan Selatan	38 619,54	41 046,28	42 823,57	44 084,07	46 712,68
Kalimantan Timur	165 546,62	174 164,82	180 259,10	161 756,71	182 540,82
Kalimantan Utara	111 318,54	119 413,88	138 751,01	143 657,14	155 080,62
Sulawesi Utara	44 744,20	48 105,40	52 173,02	50 521,13	54 043,18
Sulawesi Tengah	45 157,28	55 518,66	61 056,03	66 306,27	81 733,04
Sulawesi Selatan	47 822,11	52 642,08	57 182,15	55 675,79	59 656,24
Sulawesi Tenggara	41 278,78	44 492,09	48 514,15	49 745,19	52 293,97
Gorontalo	29 565,12	31 827,62	34 976,65	35 693,16	37 170,45
Sulawesi Barat	29 675,86	32 059,09	34 111,83	32 809,67	35 036,02
Maluku	22 859,29	24 268,62	26 097,04	25 093,81	26 072,99
Maluku Utara	26 686,06	29 586,11	32 124,96	33 085,43	40 302,32
Papua Barat	78 423,63	84 958,02	87 542,37	73 932,60	73 539,00
Papua	57 864,13	63 385,68	56 618,95	46 427,15	54 034,26

Sumber: BPS, diolah

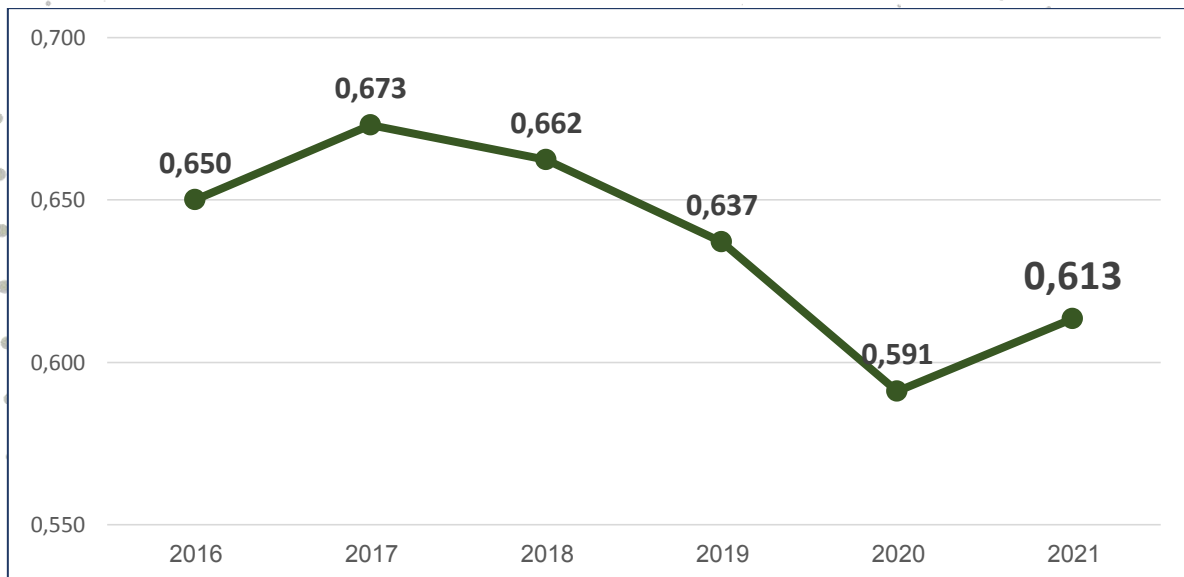
Keterangan :

* : Angka sementara

** : Angka sangat sementara

Kondisi Ketimpangan Antar Wilayah Regional Kalimantan

Berdasarkan penghitungan Indeks Williamson, kesenjangan antar wilayah dalam regional Kalimantan juga tercatat masih cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh besaran angka Indeks Williamson yang masih berada di kisaran angka 0,60. Pada periode 2017-2020, ada kecenderungan angka tersebut semakin menurun. Namun pada tahun 2022, indeks Williamson antar provinsi di Pulau Kalimantan mengalami sedikit kenaikan, menjadi 0,613 setelah tahun sebelumnya sempat turun ke angka 0,591. Tampaknya, perbaikan ekonomi pada tahun 2021 tersebut tidak diimbangi dengan perbaikan kondisi ketimpangan di regional pulau Kalimantan pada tahun tersebut.



Sumber: BPS, diolah

Gambar 3.7 Indeks Williamson PDRB Per Kapita Antar Provinsi Regional Kalimantan

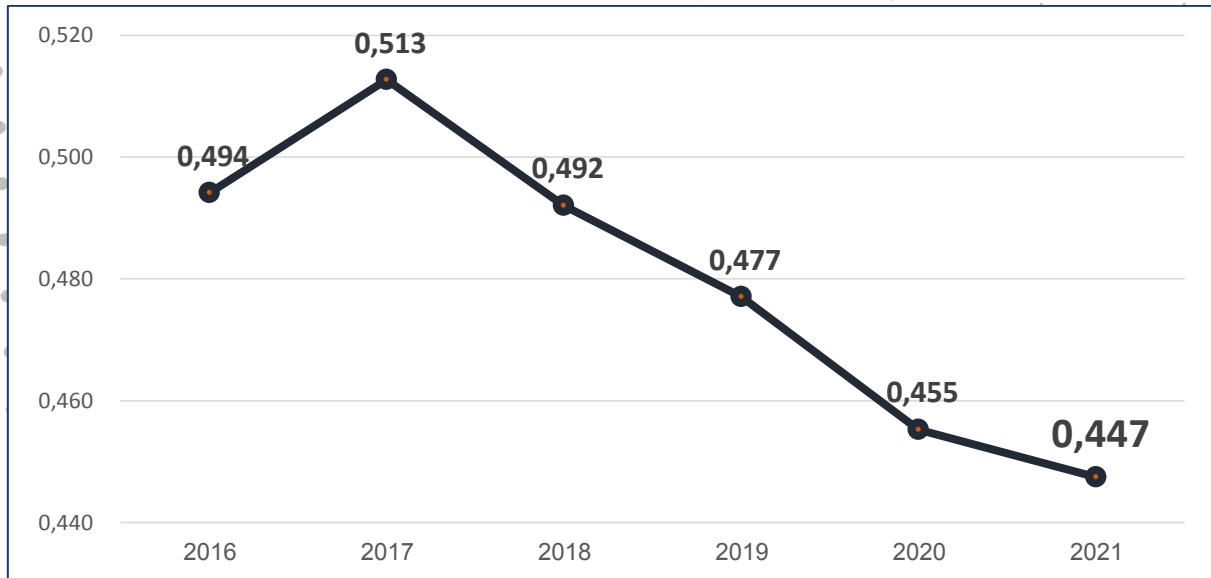
Secara umum, struktur perekonomian di pulau Kalimantan masih mengandalkan kekayaan sumber daya alam atau sektor primer. Sektor Pertanian menjadi *leading sector* bagi perekonomian di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, sedangkan sektor Pertambangan dan Penggalian menjadi *leading sector* bagi perekonomian di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Ketimpangan yang cukup tinggi pada regional Kalimantan ini disebabkan perbedaan potensi dan produktivitas hasil sumber daya alam pada masing-masing provinsi.

Pada tahun 2021, Kalimantan Timur memegang 49,66 persen perekonomian di pulau Kalimantan, disusul Kalimantan Barat yang menyumbang 16,53 persen perekonomian. Sedangkan Kalimantan Utara hanya menyumbang 7,91 persen.

Jika dilihat dari PDRB per kapita, Kalimantan Timur memiliki PDRB per kapita yang tertinggi, mencapai 182,54 juta rupiah. Sedangkan provinsi dengan PDRB per kapita terendah di pulau Kalimantan yaitu Kalimantan Barat, sebesar 42,28 juta rupiah, hanya seperempat dari PDRB per kapita Kalimantan Timur.

Kondisi Ketimpangan di Kalimantan Timur

Dalam konteks wilayah Kalimantan Timur, kondisi ketimpangan di wilayah ini relatif moderat, bahkan termasuk rendah. Hal ini ditunjukkan oleh besaran nilai Indeks Williamson di dalam wilayah Kalimantan Timur yang berada pada kisaran 0,40 - 0,50. Nilai tersebut menunjukkan bahwa antar kabupaten/kota di Kalimantan Timur memiliki kondisi ekonomi yang sudah relatif homogen. Di sisi lain, besaran yang dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir mengindikasikan adanya penurunan ketimpangan antar kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Namun demikian, masih diperlukan berbagai kebijakan yang lebih tepat yang dapat lebih menurunkan ketimpangan antara kabupaten/kota yang terjadi agar besarnya ketimpangan bisa semakin diperkecil.



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 3.8 Indeks Williamson PDRB Per Kapita Antar Wilayah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur

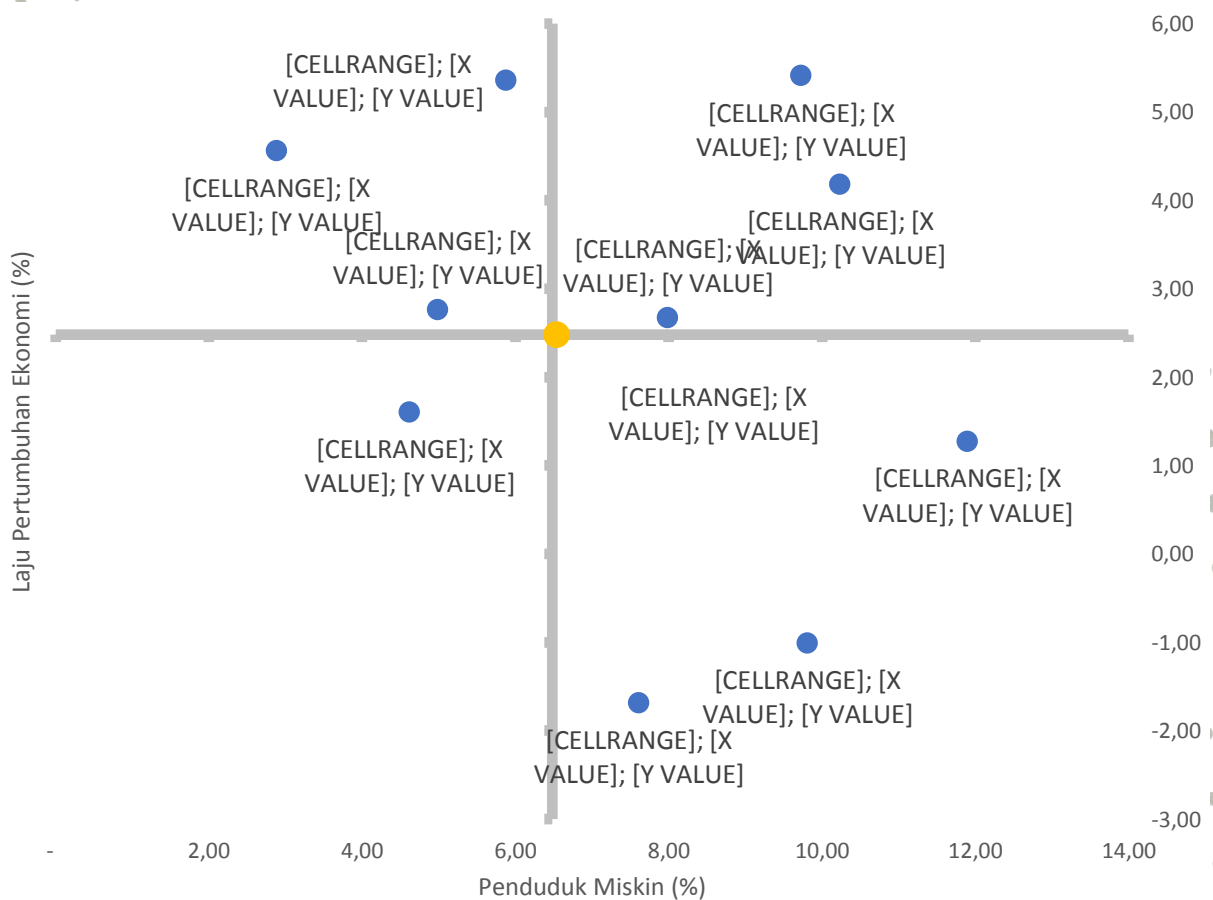
Kondisi perekonomian kabupaten/kota yang hampir homogen tersebut disebabkan karena wilayah kabupaten/kota di Kalimantan Timur memiliki struktur ekonomi yang hampir sama. Sebagian besar perekonomian di kabupaten/kota di Kalimantan Timur mengandalkan sumber daya alam atau memiliki karakteristik ekonomi yang berbasis sektor primer. Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi penyumbang perekonomian terbesar di Kalimantan Timur, disusul oleh Kabupaten Kutai Timur dan Kota Balikpapan. Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur sangat mengandalkan perekonomiannya pada sektor Pertambangan dan Penggalian, sedangkan Kota Balikpapan mengandalkan industri pengolahan, khususnya industri pengilangan migas sebagai sumber perekonomian.

Berdasarkan PDRB per kapita di wilayah kabupaten/kota di Kalimantan Timur, Kota Bontang memiliki PDRB per kapita tertinggi di tahun 2021 yakni mencapai 320,44 juta rupiah, sedangkan Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki PDRB per kapita terendah, sebesar 55,84 juta rupiah.

3.3 Tipologi Klassen

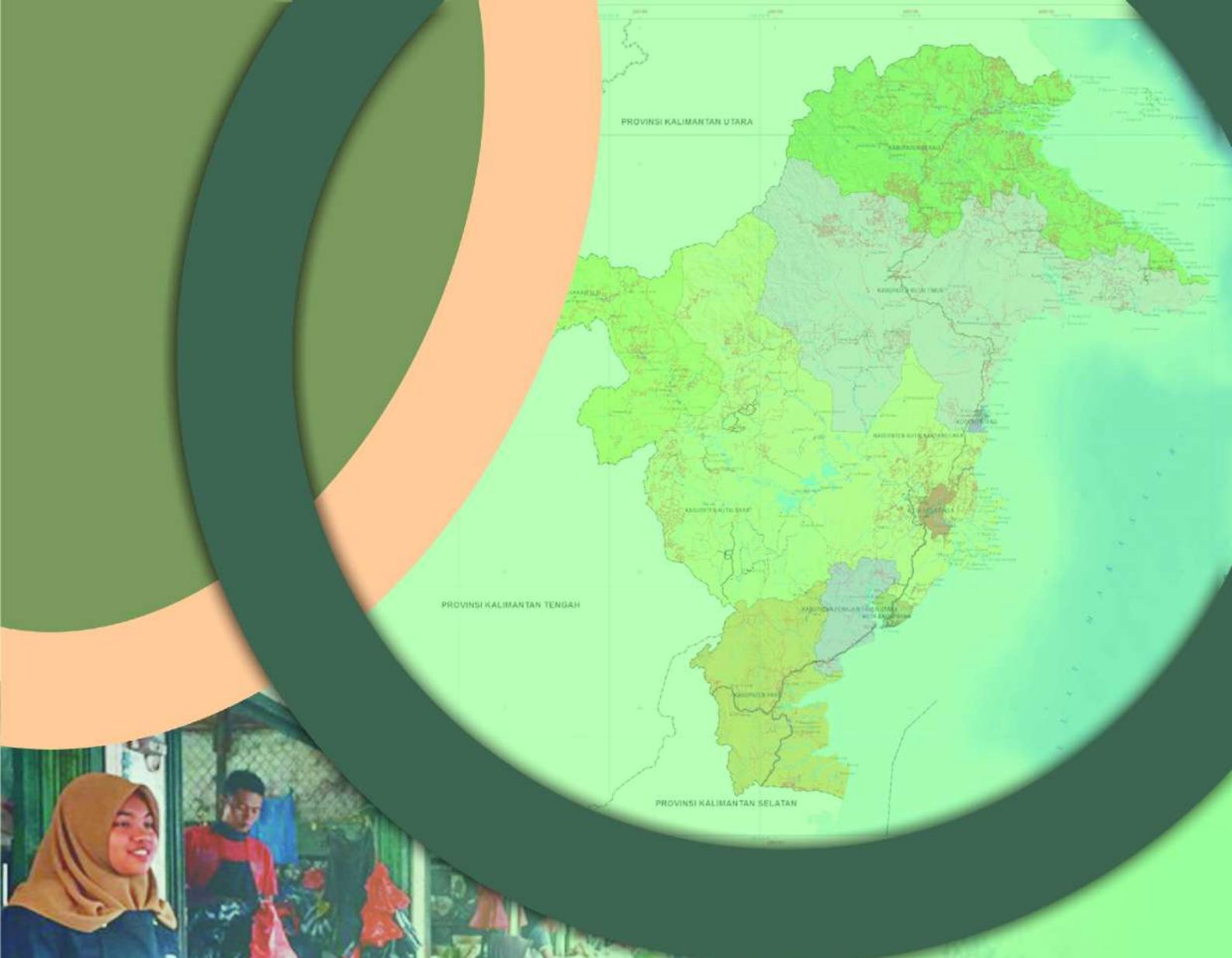
Tipologi kelas dapat digunakan untuk memetakan dan melihat keterbandingan antar wilayah. Tipologi Klassen ini akan mengelompokkan kabupaten/kota berdasarkan Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Persentase Penduduk Miskin dengan membandingkan pada level provinsi Provinsi Kalimantan Timur.

Sejak tahun 2020, terjadi pandemi Covid-19 yang berdampak pada turunnya perekonomian serta meningkatnya angka kemiskinan di hampir seluruh wilayah termasuk di seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Timur. Meskipun perekonomian sudah mulai membaik, namun angka kemiskinan di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur masih menunjukkan peningkatan. Diharapkan seiring dengan pemulihan ekonomi yang mulai terasa, dalam beberapa tahun ke depan jumlah dan persentase penduduk miskin di seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur akan terus berkurang.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah

Gambar 3.10 Tipologi Klassen Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Persentase Penduduk Miskin, Tahun 2021



Alamat Kantor :
Jl. Kesuma Bangsa No. 2 Samarinda 75123,
Telp : 0541 - 742283
<http://bappeda.kaltimprov.go.id>
e-mail : mail@bappedakaltim.com

BAPPEDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR